



2025-2029

RENSTRA

DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025



dispang@sultengprov.go.id
www.dpp.sultengprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman utama dalam merencanakan dan melaksanakan program-program strategis untuk mendukung terwujudnya kedaulatan dan kemandirian pangan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam rangka menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan, Renstra ini disusun dengan memperhatikan kondisi dan tantangan yang ada, serta dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, daerah, dan regulasi yang relevan. Fokus utama dalam Renstra ini adalah penyediaan pangan yang berkualitas, terjangkau, serta keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada. Diharapkan dengan adanya program-program yang tertuang dalam Renstra ini, dapat mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor dan memperkuat kapasitas pangan lokal.

Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memfasilitasi pemenuhan pangan, serta melaksanakan pengawasan dan pengelolaan kualitas pangan yang sesuai dengan standar. Renstra ini juga bertujuan untuk menanggulangi kerawanan pangan di daerah rawan dan terpencil, serta mengembangkan berbagai solusi berbasis kearifan lokal untuk mendukung keberagaman pangan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh stakeholder terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk bekerja sama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat mewujudkan Provinsi Sulawesi Tengah yang mandiri dalam pemenuhan pangan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan arah yang jelas dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pangan di masa yang akan datang.

Palu, 22 September 2025

**Plt. Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah**

RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag., M.Si
Pembina Tkt I
NIP. 19710112 199803 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DATAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.3.1 Maksud	7
1.3.2 Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	10
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.1.2 Struktur Organisasi	19
2.2 Sumber Daya Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	20
2.3 Sumber Daya Aset Yang dikuasai Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.	23
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	24
2.4.1 Target Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Pangan Tahun 2020-2024	26
2.4.2 Kemandirian Pangan	33
2.4.3 Kondisi Umum	43
2.4.3.1 Ketersediaan Pangan	45
2.4.3.2 Keterjangkauan Pangan	47
2.4.3.3 Pemanfaatan Pangan	49
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pangaan Provinsi Sulawesi tengah	51
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	31

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan	59
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
4.1 Uraian Program Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	63
4.2 Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	42
4.3 Uraian SubKegiatan Beserta Kinerja, indikator, Target, dan Pagu Indikatif Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	83
4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	115
4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	117
BAB V PENUTUP	119

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	20
2. Sumberdaya Aset yang dikuasai Dinas Pangan	23
3. Target dan Capaian Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	26
4. Target dan Capaian Indikator Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	30
5. Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dan 13 Kabupaten/Kota	35
6. Indeks Ketahanan Pangan Beberapa Provinsi di Indonesia	36
7. Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional	38
8. Prevalence of Undernourishment (PoU) Provinsi Sulawesi Tengah dan 13 Kab/Kota Tahun 2020-2024	39
9. Perbandingan Prevalence of Undernourishment (PoU) Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional	42
10. Data Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2020-2024	46
11. Ketersediaan energi, Protein dan Lemak Perkapita Per Hari tahun 2020-2024	46
12. Perkembangan Harga Pangan Strategis tahun 2020-2024	49
13. Perkembangan Konsumsi Energi, Konsumsi Protein dan Skor PPH Konsumsi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015 – 2024	50
14. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	52
15. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	57
16. Penetapan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	58
17. Program Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	63
18. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan	65
19. Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	83
20. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan	85
21. Indikator Kinerja Utama RENSTRA Dinas Pangan Tahun 2025-2029	116
22. Indikator Kinerja Kunci RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	1
2. Gravig Tren Anggaran Target vs Capaian Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024	2
3. Grafik Rasio Terhadap Target Anggaran Dinas Pangan	28
4. Grafik Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024	36
5. Grafik Bar Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kab/Kota tahun 2024	37
6. Grafik Prevalence of Undernourishment (PoU) Provinsi Sulawesi Tengah	40
7. Grafi Bar Perkembangan Prevalence of Undernourishment (PoU) di 13 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah	41
8. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2020	43
9. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2021	43
10. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2022	44
11. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2023	44
12. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024	45
13. Inflasi Pangan Bergejolak Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020-2024 ...	48
14. Logframe Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan Provinsi Sulaweii Tengah tahun 2025-2029	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi dan faktor penentu kualitas sumber daya manusia. Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut aspek ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan, distribusi, stabilitas harga, keamanan, serta keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah perlu didasarkan pada analisis kondisi pangan dari perspektif global, nasional, hingga daerah.

Secara global, sistem pangan menghadapi tantangan besar akibat pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, degradasi lahan, serta ketidakstabilan geopolitik. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat bahwa ratusan juta penduduk dunia masih mengalami kerawanan pangan dan gizi. Pandemi COVID-19, disrupti rantai pasok internasional, serta konflik di beberapa kawasan turut memperparah situasi dengan mendorong inflasi harga pangan, terutama komoditas strategis seperti beras, gandum, jagung, dan minyak nabati. Ketergantungan antarnegara dalam perdagangan pangan mengakibatkan gejolak harga internasional berimbas langsung ke tingkat nasional maupun daerah.

Di Indonesia, pangan dipandang sebagai salah satu pilar pembangunan nasional. Pemerintah melalui berbagai kebijakan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, menekankan pentingnya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau. Namun, Indonesia masih menghadapi beberapa persoalan strategis, antara lain:

- Tingginya ketergantungan pada beras sebagai pangan pokok.
- Masih tingginya angka stunting yang terkait dengan kualitas konsumsi pangan.
- Kerentanan terhadap fluktuasi harga pangan, terutama pada komoditas cabai, bawang, telur, dan daging ayam.
- Kesenjangan akses pangan antarwilayah.

Upaya diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan pangan pemerintah, serta pengembangan sistem distribusi terus digalakkan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu serta meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar dalam mendukung ketersediaan pangan, baik dari subsektor pertanian, perikanan, maupun perkebunan. Beberapa komoditas unggulan daerah antara lain padi, jagung, kakao,

kelapa, dan perikanan laut. Meski demikian, Sulawesi Tengah masih menghadapi tantangan, di antaranya:

- Distribusi pangan belum merata akibat kondisi geografis yang terdiri dari wilayah kepulauan dan pegunungan.
- Kerentanan terhadap bencana alam (gempa bumi, tsunami, banjir) yang dapat mengganggu sistem produksi dan distribusi pangan.
- Tingkat konsumsi pangan masyarakat yang masih terfokus pada beras, sehingga program diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal perlu diperkuat.
- Masih terdapat wilayah dengan kerawanan pangan tinggi, terutama di daerah terpencil.

Melihat kondisi tersebut, penyusunan RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan dan program kerja lima tahun ke depan. RENSTRA diharapkan mampu menjawab tantangan global dan nasional, sekaligus mengoptimalkan potensi lokal guna mewujudkan sistem pangan yang tangguh, berdaulat, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah (PD) untuk periode 2025-2029 juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui ketersediaan pangan, mengoptimalkan distribusi pangan, dan menciptakan kemandirian pangan bagi masyarakat. Renstra ini bertujuan memberikan arahan kebijakan yang jelas dan terukur dalam pengelolaan sektor pangan, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, serta menghadapi tantangan dalam mengelola ketersediaan pangan yang semakin kompleks.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pertanggungjawaban Gubernur, Bupati/Walikota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pangan
 22. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 24. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6841);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan

atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal;
37. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
38. Peraturan Menteri Pertanian No. 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tatacara perubahan Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan Daerah;

41. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
44. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 144);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161);
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 140, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126) Tanggal 17 Desember 2021.
47. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dimaksudkan sebagai pedoman arah pembangunan urusan pangan di daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. RENSTRA ini menjadi instrumen manajemen pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan

kegiatan strategis, sehingga seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, efektif, dan berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah ke dalam arah kebijakan, program, dan kegiatan operasional di bidang pangan.
2. Menyediakan dokumen perencanaan strategis yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah serta kebijakan nasional di bidang ketahanan pangan.
3. Menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pembangunan pangan daerah secara terukur, transparan, dan akuntabel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pangan lokal untuk meningkatkan kemandirian dan diversifikasi pangan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pangan melalui penguatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan mutu pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
6. Menjawab tantangan dan permasalahan pangan baik yang bersifat global, nasional, maupun lokal, dengan strategi yang adaptif dan inovatif.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika tulisan dan maksud serta tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PANGAN

Bab ini menjelaskan tugas dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Sumber Daya yang dimiliki, Kinerja Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memaparkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Bab ini memaparkan tentang program, kegiatan, subkegiatan menurut pembagian urusan kewenangan daerah, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta kinerja penyelenggaran bidang urusan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pangan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, dimana setiap pemerintah daerah harus menyiapkan seluruh infrastruktur dan kelembagaannya sehingga urusan pangan tidak mengalami masalah dalam implementasinya karena menyangkut pemenuhan hajat hidup masyarakat/orang banyak. Dinas Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat Daerah lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. dan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pangan.

Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. pada bidang kesekretariatan, bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, UPT Pengawasan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.

KEPALA DINAS PANGAN

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Pangan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- g. . pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pemantauan pengendalian penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan persiapan bahan penyusunan program, keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian Program, Keuangan dan Aset;
- b. melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana Program, Keuangan dan Aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. melaksanakan persiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit terkait;
- d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan aset meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan, penyajian informasi, dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
- e. melaksanakan persiapan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- g. melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategi di lingkungan instansi terkait;
- h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan persiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- j. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- k. melaksanakan tugas kedinasn lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. melaksanakan persiapan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian, Keuangan dan Aset serta Dinas.

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. Uraian tugas sub bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP
- f. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- i. melaksanakan/mengelola Angka Fungsional; Kredit Jabatan
- j. melakukan fasilitasi urusan Dewan Ketahanan Pangan;
- k. melaksanakan penataan dan pengelolaan Dewan Ketahanan Pangan;
- l. melaksanakan/menyusun penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- m. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan Upacara, rapat, penerimaan kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi tamu, hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- o. melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
- p. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian Dinas.

BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan dan Sumber Daya Pangan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, dan Sumberdaya Pangan;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung pangan lainnya;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung Pangan lainnya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung Pangan lainnya;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung Pangan lainnya;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung Pangan lainnya;
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijaka di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat;
- f. penyiapan pemantapan program di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat;
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Distribusi Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.

BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan pemberian bimbingan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan Promosi Ketahanan Pangan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan promosi ketahanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan promosi ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan promosi ketahanan pangan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan promosi ketahanan pangan;

- f. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan promosi ketahanan pangan;
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan Promosi Ketahanan Pangan.

UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang pengawasan, sertifikasi mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan pengawasan, sertifikasi mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan pada UPT;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional kegiatan pengawasan, sertifikasi mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- d. penyiapan bahan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan di bidang pengawasan, sertifikasi mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk

- teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
 - d. melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi pegawai, pembuatan Karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, disiplin, Diklat pengembangan SDM serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
 - e. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
 - g. melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis;
 - h. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.

Seksi Mutu Keamanan Pangan

Seksi Mutu Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan Penerapan teknis dan operasional, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan kegiatan Seksi Mutu Keamanan Pangan. Uraian tugas Seksi Mutu Keamanan Pangan dimaksud pada ayat (I) meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Mutu Keamanan Pangan;
- b. menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Mutu Keamanan Pangan;
- c. melaksanakan Penyusunan kebutuhan pelatihan dan program pelatihan Seksi Mutu Keamanan Pangan;
- d. melaksanakan kegiatan pengambilan sampel kepada petani/pelaku usaha dan melakukan Pengujian Sampel terhadap produk yang akan disertifikasi;

- e. melaksanakan Pengkajian bahan kebijakan dan petunjuk teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- f. melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis kepada personel UPT Pengawasan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
- g. mensosialisasikan Sistem Manajemen Mutu kepada seluruh personel UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu, dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap penerapan sistem jaminan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- i. melaksanakan verifikasi dokumen permohonan sertifikasi mutu pangan, dan mengaudit lapang Petani/Pelaku Usaha yang akan mengajukan permohonan untuk disertifikasi Prima 1, Prima 2, Sertifikat Kesehatan dan Perizinan Rumah Kemas;
- j. menyiapkan penyelenggaraan temu teknis kelembagaan pengawasan keamanan pangan secara teknis dan administrasi antara Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dengan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Mutu Keamanan Pangan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis dan operasional serta mengkoordinasikan kegiatan di Seksi Pengawasan Keamanan Pangan. Uraian tugas Seksi Pengawasan Keamanan Pangan dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
- b. menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Teknis Keamanan Pangan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan inspeksi dan pengambilan contoh Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- d. menerapkan Pengawasan Sistem jaminan Mutu dan keamanan pangan;

- e. melakukan pengawasan pangan segar terkait produk layanan (nomor pendaftaran, sertifikat, logo Prima) melalui surveilen;
- f. melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait dalam Pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- g. pengawasan peredaran pangan segar di wilayah kabupaten/ kota (Pendaftaran pelaku usaha, inspeksi dan monitoring keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan);
- i. melaksanakan Kegiatan lain yang mendukung fungsi pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- h. membentuk / melaksanakan kegiatan jejaring Pengawasan keamanan pangan Asal Tumbuhan dengan Instansi terkait;
- i. melaksanakan pengawasan terhadap peredaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Teknis Keamanan Pangan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi 2 Sub Bagian yaitu:
 - a). Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 - b). Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat;
- e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- f. UPT Pengawasan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Tata Usaha
 - b). Seksi Mutu dan Keamanan Pangan;
 - c). Seksi Pengawasan keamanan Pangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi terdiri dari:

- Sekretariat (membidangi perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum).
- Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
- Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.
- UPTD yang menangani laboratorium pengujian mutu dan keamanan pangan.

Struktur organisasi ini memungkinkan koordinasi yang efektif dalam menyelenggarakan urusan pangan lintas bidang.

2.2 Sumber Daya Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 104 orang Pegawai ASN (PNS & PPPK) dan 57 orang pegawai kontrak (Honorar/PHL), diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH (Orang)
A	PNS, PPPK dan Honorar	
1	PNS	55
2	PPPK	49

NO	URAIAN	JUMLAH (Orang)
3	Honorer	57
B	ASN Menurut Jabatan Jstruktural	
1	Eselon II	0
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	5
C	ASN Menurut Jabatan Fungsional	
1	Analisis Ketahanan Pangan (AKP) Muda	10
2	Analisis Ketahanan Pangan (AKP) Madya	5
D	ASN Menurut Golongan	
1	Golongan IV	16
2	Golongan III	37
3	Golongan II	2
4	Golongan I	
E	PPPK Menurut Golongan	
1	Golongan V	9
2	Golongan IX	4

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dapat berkontribusi pada pencapaian target pelaksanaan RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dengan mempertimbangkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1. Pemenuhan Target Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang berkualitas dan terjangkau

Salah satu sasaran utama dalam Renstra Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang Berkualitas dan Terjangkau. Untuk mencapai ini, SDM harus memiliki keahlian dalam manajemen cadangan pangan dan distribusi yang merata.

- Golongan III (37 orang) memiliki potensi besar dalam melakukan perencanaan dan pengawasan teknis. Mereka dapat dilibatkan dalam penyusunan strategi distribusi pangan dan manajemen logistik untuk memastikan cadangan pangan dapat diakses oleh masyarakat sesuai kebutuhan.
- Eselon III dan IV yang lebih sedikit jumlahnya (3 dan 5 orang) sebaiknya difokuskan untuk perencanaan strategis dan pengawasan kebijakan, memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Monitoring dan Evaluasi (M&E)

Salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan adalah indeks ketahanan pangan yang memerlukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

- Pegawai di eselon III dan IV, meskipun sedikit jumlahnya, dapat dilibatkan dalam pembangunan sistem M&E yang lebih efektif. Dengan jumlah pegawai yang terbatas, mereka dapat fokus pada pengawasan pencapaian indikator, mendokumentasikan hasil, dan mengidentifikasi kendala dalam mencapai sasaran.
- Golongan II dan III, dengan peran yang lebih teknis, perlu diberikan pelatihan sistem pengumpulan data dan pelaporan untuk memastikan keberlanjutan evaluasi yang efektif sepanjang tahun.

3. Peningkatan Kompetensi SDM

Untuk mencapai target-target yang dicanangkan pada tahun 2024 hingga 2030, diperlukan adanya program pelatihan bagi seluruh tingkat SDM, baik untuk penyuluh pertanian maupun pengelola distribusi pangan.

- Pelatihan dan sertifikasi dalam hal pengelolaan keamanan pangan dan teknologi pertanian harus menjadi prioritas utama bagi SDM, khususnya untuk petugas yang berhubungan langsung dengan pengelolaan cadangan pangan dan distribusi.
- Dinas Pangan dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan pengetahuan dalam pengelolaan pangan berbasis data untuk memantau dan mengevaluasi indeks ketahanan pangan.

4. Penguatan Pengawasan dan Koordinasi Lintas Instansi

Penguatan koordinasi antara Dinas Pangan dengan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan sektor lainnya sangat penting untuk mencapai sasaran dalam pengelolaan pangan.

- Eselon II dan III, meskipun terbatas, dapat fokus pada koordinasi kebijakan antar lembaga, mendukung tercapainya target distribusi pangan yang lebih efisien. Mereka dapat berperan dalam membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk memperkuat ketahanan pangan.

5. Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Pangan

SDM yang ada harus mampu merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi berbagai tantangan terkait ketersediaan pangan, kerawanan pangan, dan pengelolaan Cadangan pangan.

- Eselon II, meskipun jumlahnya sedikit, berperan penting dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan strategis yang akan memandu Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam merespons isu ketahanan pangan di masa depan.

- Golongan III dapat membantu dalam implementasi kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan tepat di tingkat lapangan.

6. Evaluasi Kinerja dan Penyesuaian Strategi

Untuk mencapai target-target jangka panjang, Dinas Pangan perlu melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menyesuaikan kebijakan yang ada.

- Pelatihan dalam evaluasi kinerja harus diberikan kepada pegawai di golongan III dan IV, dengan fokus pada teknik pengumpulan data yang relevan dan penggunaan data untuk penyesuaian kebijakan.
- Eselon II dan III dapat fokus pada penyusunan laporan dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi yang mendalam.

Sumber daya manusia di Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang terbatas akan menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian target RENSTRA. Namun, dengan strategi yang tepat seperti peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi antar instansi, dan pelaksanaan pelatihan yang berkelanjutan target ketersediaan pangan, cadangan pangan, dan indeks ketahanan pangan dapat tercapai.

Selain itu, untuk mempercepat pencapaian sasaran RENSTRA, penting bagi SDM untuk lebih fokus pada pemantauan dan evaluasi berkala, serta implementasi kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan kondisi pangan di provinsi ini.

2.3 Sumber Daya Aset Yang dikuasai Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber Daya Aset yang dikuasai Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, berupa kendaraan operasional, adapun kendaraan dan alat mesin dimaksud adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. Sumberdaya Aset yang Dikuasai Dinas Pangan

Nomor	Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang	Nilai Barang
1	2	3	4	5
1	Motor	6	Baik	586.711.967
2	Mobil	10	Baik	2.602.715.008
3	Kaisar	2	Baik	54.852.500
5	mesin ketik	7	Baik	31.350.000
6	Lemari	44	Baik	262.608.367
7	Meja	123	Baik	29.029.800
8	Kursi	65	Baik	30.381.313
9	gerobak dorong	2	Baik	2.600.000

Nomor	Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang	Nilai Barang
10	mesin absensi	5	Baik	17.127.000
14	Kursi	65	Baik	30.381.312
15	Ac	41	Baik	45.645.000
16	Tv	3	Baik	18.680.000
17	Laptop	25	Baik	192.750.000
18	Computer	46	Baik	211.250.000
19	Printer	58	Baik	272.000.000
20	Cctv	2	Baik	35.724.998
21	mesin potong rumput	2	Baik	835.328
22	Dispenser	4	Baik	9.000.000
23	Michrophone	8	Baik	12.000.000
24	Soundsystem	6	Baik	24.080.000
25	Tangga	1	Baik	54.010.000
26	Camera	2	Baik	16.800.000
27	mesin ketik	2	Baik	31.350.000
28	Proyektor	2	Baik	13.380.000

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencakup berbagai lapisan masyarakat dan wilayah yang memerlukan intervensi dalam bidang ketahanan pangan. Berdasarkan kelompok sasaran tersebut antara lain:

1. Masyarakat Umum, Kelompok Masyarakat, Petani, UMKM, PKK, Anak Sekolah dan Kelompok pengusaha.

Beberapa program yang berkaitan dalam peningkatan ketahanan pangan masyarakat di Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

- b. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
 - c. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat
 - d. Program penanganan kerawanan pangan
 - e. Program pengawasan keamanan pangan
2. Kelompok Rentan dan Masyarakat Miskin

Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah difokuskan pada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana, perubahan gejolak harga yang signifikan, serta masyarakat miskin dan rawan pangan.

3. Wilayah dengan Kerawanan Pangan Tinggi

Intervensi juga diarahkan pada daerah-daerah dengan kerawanan pangan tinggi di 13 Kab/Kota

2.4.1 Target Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Pangan Tahun 2020-2024

Tabel 3. Target dan Capaian Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
01.0000	Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah			54.612.313.373,00	53.305.505.328,00	65.242.581.758,00	61.540.429.051,00	63.537.003.382,00	61.836.264.830,00	39.663.783.466,00	29.049.384.206,00	35.610.629.525,00	33.789.544.565,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			54.612.313.373,00	53.305.505.328,00	65.242.581.758,00	61.540.429.051,00	63.537.003.382,00	61.836.264.830,00	39.663.783.466,00	29.049.384.206,00	35.610.629.525,00	33.789.544.565,00
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			54.612.313.373,00	53.305.505.328,00	65.242.581.758,00	61.540.429.051,00	63.537.003.382,00	61.836.264.830,00	39.663.783.466,00	29.049.384.206,00	35.610.629.525,00	33.789.544.565,00
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pengelolaan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	%	27.421.480.814,00	26.759.117.600,00	37.729.819.149,00	34.732.313.720,00	21.904.087.534,00	21.365.816.589,00	13.301.241.932,00	4.633.397.023,00	6.120.085.523,00	6.051.027.273,00
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Skor	11.721.497.222,00	11.629.033.313,00	19.295.529.900,00	19.064.480.986,00	21.648.213.881,00	21.461.497.243,00	11.265.102.941,00	11.089.554.321,00	11.051.418.025,00	10.638.426.532,00
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skor											
	Persentase Penguatan Cadangan Pangan minimal 370 ton	%											
	Inflasi Pangan Bergejolak	%											
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Ketersediaan Pangan (Beras)	%	11.637.993.000,00	11.420.763.410,00	4.369.804.082,00	4.213.315.572,00	6.216.382.207,00	6.001.215.182,00	1.274.572.016,00	1.068.726.767,00	3.370.365.317,00	3.284.253.001,00
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%	462.904.600,00	458.224.500,00	692.699.000,00	633.159.700,00	557.263.000,00	528.012.478,00	985.513.843,00	985.513.843,00	1.019.340.950,00	971.385.255,00
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Revormasi Birokrasi	%	3.368.437.737,00	3.038.366.505,00	3.154.729.627,00	2.897.159.073,00	13.211.056.760,00	12.479.723.338,00	12.837.352.734,00	11.272.192.252,00	14.049.419.710,00	12.844.452.504,00

Secara keseluruhan, alokasi anggaran Dinas Pangan tiap tahun mengalami fluktuasi. Target anggaran dari 2020 hingga 2024 menunjukkan tren menurun setelah 2021, dengan capaian yang juga tidak selalu sesuai target. Hal ini bisa mencerminkan penyesuaian kebijakan, efisiensi program, atau keterbatasan realisasi di lapangan.

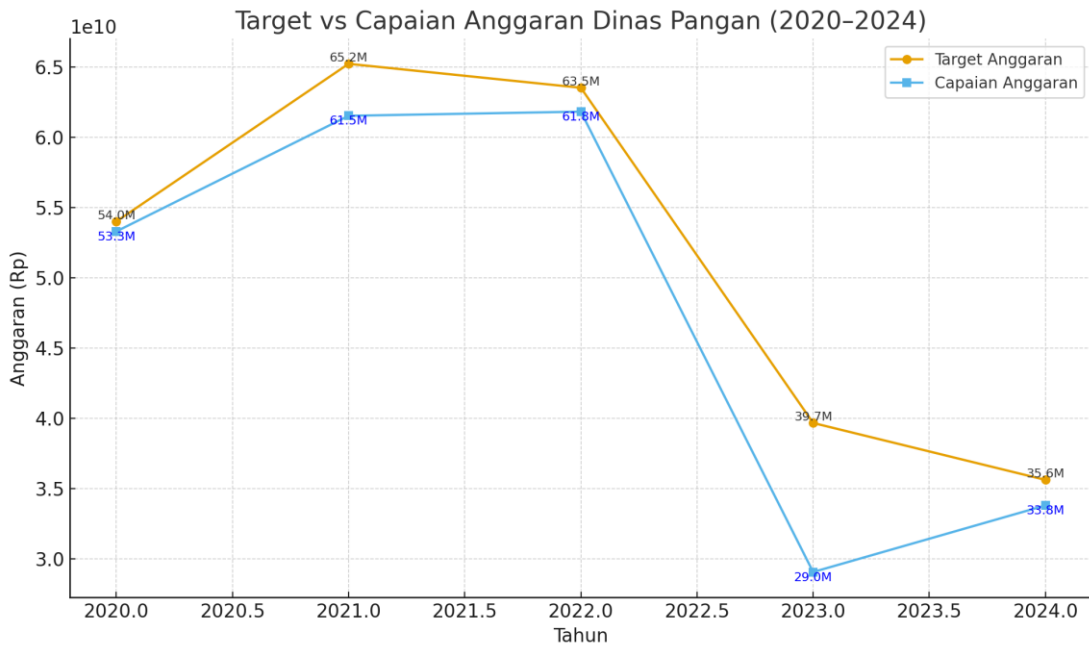
Tahun 2020 arget: Rp 54,012 Miliar Capaian: Rp 53,305 Miliar Realisasi mencapai sekitar 98,7% dari target. Ini menunjukkan bahwa pada tahun awal pandemi COVID-19, meskipun ada keterbatasan, kinerja penyerapan anggaran masih cukup baik. Tahun 2021 Target: Rp 65,242 Miliar Capaian: Rp 61,540 Miliar Realisasi sekitar 94,3% dari target. Terdapat kenaikan alokasi yang signifikan dibanding 2020 (sekitar 20,8%). Hal ini bisa berkaitan dengan program ketahanan pangan saat masa pemulihan pandemi. Tahun 2022 Target: Rp 63,537 Miliar Capaian: Rp 61,836 Miliar Realisasi sekitar 97,3%. Alokasi sedikit menurun dari 2021, tetapi penyerapan relatif baik dan lebih stabil. Tahun 2023 Target: Rp 39,663 Miliar Capaian: Rp 29,049 Miliar Realisasi hanya 73,2%. Terjadi penurunan drastis target anggaran dibanding tahun sebelumnya, dan realisasinya pun tidak optimal. Ini mungkin akibat refocusing anggaran pemerintah daerah atau prioritas lain yang lebih mendesak. Tahun 2024 Target: Rp 35,610 Miliar Capaian: Rp 33,789 Miliar Realisasi sekitar 94,9%, cukup baik jika dibandingkan dengan 2023, meskipun alokasi tetap jauh lebih rendah dibanding masa 2020–2022.

Tren program utama yang ada di Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut:

- Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan: anggarannya fluktuatif dan realisasi sering lebih rendah dari target. Ini menandakan adanya tantangan dalam implementasi.
- Program Pengawasan Keamanan Pangan & Pengendalian Cadangan Pangan: cenderung stabil, tetapi realisasi juga tidak selalu penuh, berkisar 80–95%.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan: menunjukkan capaian yang relatif konsisten, meskipun targetnya lebih kecil dibanding program inti.

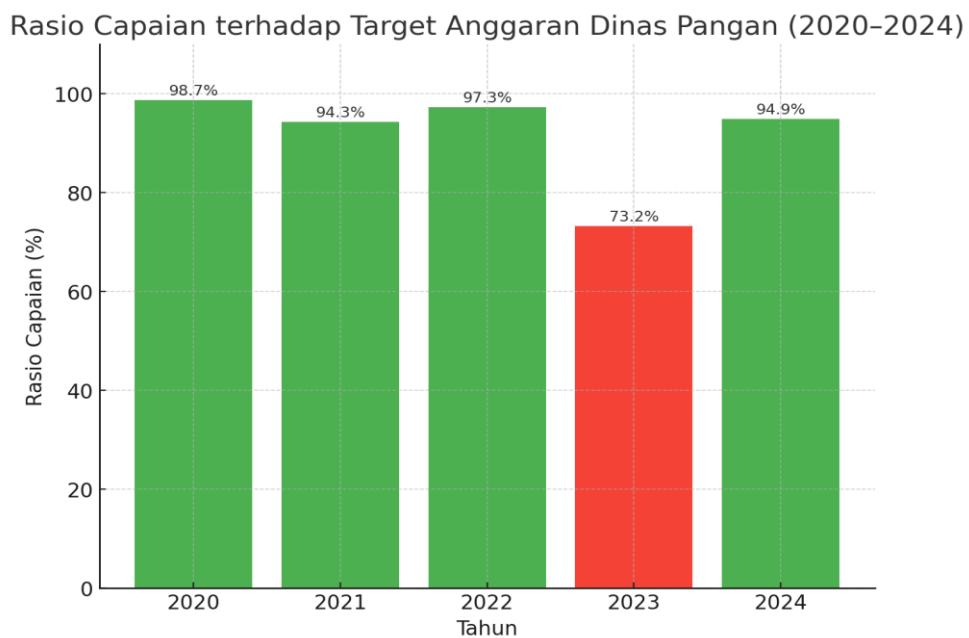
Tingkat Realisasi: Dari lima tahun terakhir, realisasi anggaran rata-rata berada pada kisaran 90–97%, kecuali tahun 2023 yang turun tajam. Puncak Alokasi: Tahun 2021 merupakan puncak alokasi anggaran, kemungkinan sebagai upaya penguatan ketahanan pangan di tengah pandemi. Tren Penurunan: Mulai 2022 hingga 2024, anggaran mengalami penurunan signifikan, mencerminkan adanya refocusing atau pergeseran prioritas. Kinerja Efektivitas: Secara umum, Dinas Pangan mampu menyerap anggaran dengan baik (mendekati 100%), meski capaian program tertentu masih menghadapi kendala.

Berikut grafik tren target vs capaian Tahun 2020–2024 Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah



Gambar 2. Grafik Tren Anggaran Target vs Capaian Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020–2024

Berikut adalah grafik Target vs Capaian Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah (2020–2024). Tahun 2020–2022 Target dan capaian relatif seimbang, dengan capaian mendekati 95–98% target. Tahun 2021 menjadi puncak anggaran, baik target maupun capaian. Tahun 2023 terlihat penurunan drastis, di mana capaian hanya 73% dari target. Tahun 2024 ada perbaikan kembali dengan capaian 94,9% meski target tetap lebih rendah dibanding masa 2020–2022. Grafik ini memperjelas tren naik–turun anggaran dan efektivitas penyerapan.



Gambar 3. Grafik Rasio Terhadap Target Anggaran Dinas Pangan

Tahun 2020-2024

Berikut adalah diagram batang rasio capaian terhadap target anggaran (2020–2024). Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2024 berada di atas 90% (efisien). Tahun 2023 menjadi tahun terendah dengan hanya 73,2% realisasi dari target, menandakan masalah penyerapan anggaran. Grafik ini memperjelas bahwa 2023 adalah anomali, sementara tahun lain relatif konsisten dalam pencapaian.

Secara umum, kinerja penyerapan anggaran Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup baik dengan tingkat realisasi di atas 90% pada sebagian besar tahun.

- Tahun 2020–2022: Realisasi anggaran berada pada kisaran 94–98%, menandakan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran cukup tinggi.
- Tahun 2021 merupakan puncak alokasi anggaran dengan target Rp65,24 miliar dan capaian Rp61,54 miliar.
- Tahun 2023 menjadi titik terendah, dengan realisasi hanya 73,2% dari target, mengindikasikan adanya kendala signifikan dalam penyerapan maupun pelaksanaan program.
- Tahun 2024 menunjukkan perbaikan dengan capaian kembali meningkat ke 94,9%, meskipun nilai target tetap lebih rendah dibanding periode 2020–2022.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pangan berhasil menjaga konsistensi penyerapan anggaran, kecuali pada tahun 2023 yang menjadi catatan penting untuk evaluasi lebih lanjut.

Tabel 4. Target dan Capaian Indikator Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
01.0000	Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah												
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pengelolaan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Skor	90	82,20	90,42	81,40	90,86	80,60	91,02	81,20	91,1	85,29
		Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skor	90	58,76	90,42	90,46	90,86	83,20	91,02	79,69	91,10	78,72
		Persentase Penguatan Cadangan Pangan minimal 370 ton	%	100	201	100	99,99	100	34,46	100	236,24	100	293,70
		Inflasi Pangan Bergejolak	%	5	1,62	5	0,84	5	0,80	5	0,22	5	3,4
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Ketersediaan Pangan (Beras)	%			22	23,40		49	19	17,05	15	15,34
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%			79,50	97,00	81	77,80	82	90,42	83	86,65
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Revormasi Birokrasi	%	60	54	62	66	63	69	64	44,98	65	16

Tabel menunjukkan indikator kinerja utama yang diukur dalam bentuk persentase, skor, maupun angka capaian, meliputi Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan. Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Penanganan kerawanan pangan. Pengawasan keamanan pangan. Dukungan urusan pemerintahan (indikator indeks birokrasi). Secara umum, hampir semua target ditetapkan konstan tiap tahun (misalnya 100% atau skor 90), namun capaian tiap tahun berfluktuasi.

Analisis per Indikator

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

- Target selalu 100%, capaian konsisten 100% selama 2020–2024. Menunjukkan indikator ini stabil tercapai penuh.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

1. Skor Pola Pangan Harapan

- Target: 90–91 setiap tahun.
- Capaian fluktuatif: 83,20 (2020), 81,40 (2021), 80,60 (2022), 81,20 (2023), 85,29 (2024).
- Capaian selalu di bawah target, walaupun mendekati, menandakan tantangan peningkatan kualitas pola pangan masyarakat.

2. Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)

- Target: 90–91.
- Capaian: 58,76 (2020) → naik di 2021–2022 (90,42 & 90,46), lalu turun di 2023 (79,69) dan 2024 (78,72).
- Terlihat peningkatan besar di 2021–2022, tapi menurun lagi setelah itu.

3. Cadangan Pangan Minimal 370 ton

- Target: 100 setiap tahun.
- Capaian sangat berfluktuasi: 201% (2020), 99,99% (2021), 34,46% (2022), 236,24% (2023), 293,70% (2024).
- Ini menunjukkan ketidakstabilan besar dalam pengelolaan cadangan pangan, kadang sangat rendah, kadang jauh melampaui target.

4. Inflasi Pangan Bergejolak

- Target: 5.
- Capaian: 1,62 (2020), 0,84 (2021), 0,80 (2022), 0,22 (2023), 3,4 (2024).
- Semua capaian lebih rendah dari target (bagus, artinya gejolak pangan terkendali), meski 2024 sedikit naik ke 3,4.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- Indikator: Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Ketersediaan Beras.
- Target: 22–25%.
- Capaian: 23,40 (2021), 49 (2022), 17,05 (2023), 15,34 (2024).
- Tahun 2022 sangat tinggi (49%), namun tahun 2023–2024 menurun signifikan, di bawah target.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- Indikator: Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan.
- Target: sekitar 79–86%.
- Capaian cukup stabil: 77,80 (2022), 90,42 (2023), 86,65 (2024).
- Tahun 2023 bahkan melebihi target, tahun 2024 masih di atas 86% sesuai target.

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan (Indeks Birokrasi)

- Target: 60–65.
- Capaian: 54 (2020), 62 (2021), 69 (2022), 44,98 (2023), 16 (2024).
- Tren menurun tajam sejak 2022. Tahun 2024 hanya 16, jauh di bawah target, mengindikasikan kelemahan serius dalam tata kelola birokrasi.

Secara umum, kinerja Dinas Pangan 2020–2022 relatif baik dan stabil, tetapi terjadi penurunan signifikan pada 2023–2024 terutama pada aspek kelembagaan dan penanganan kerawanan pangan.

Tabel 3 menampilkan alokasi anggaran, target, dan capaian keuangan, sedangkan tabel 4 memperlihatkan indikator kinerja (outcome) yang diukur dalam persentase maupun skor. Keterkaitan keduanya penting untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran: apakah besarnya anggaran yang diserap benar-benar sejalan dengan capaian kinerja di lapangan.

A. Keterkaitan Tahun per Tahun

Tahun 2020–2022 Anggaran Tinggi Kinerja Relatif Stabil. Anggaran pada 2020–2022 relatif besar (Rp54–65 miliar) dengan realisasi >94% dari target. Capaian kinerja juga cukup baik dimana Skor Pola Pangan Harapan masih di bawah target namun stabil di kisaran 80-an. Indeks pangan bergejolak rendah (positif → harga pangan relatif terkendali). Indeks birokrasi sempat naik hingga 69 di 2022, melebihi target. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya serapan anggaran di periode ini mampu menopang pencapaian sebagian besar indikator, meski tidak semuanya maksimal.

Tahun 2023 Anggaran Rendah, Kinerja Menurun Dimana Anggaran turun drastis (Rp39 miliar target, realisasi Rp29 miliar → hanya 73,2%). Dampak terlihat pada

kinerja Skor Pola Pangan Harapan masih stagnan di 81,20 (tetap di bawah target). Skor Ketersediaan turun ke 79,69. Indeks Birokrasi anjlok ke 44,98, jauh di bawah target. Artinya, penurunan alokasi dan rendahnya serapan anggaran berimplikasi pada menurunnya kinerja beberapa indikator utama, terutama kelembagaan dan ketahanan pangan.

Tahun 2024 Anggaran Pulih Sebagian, Kinerja Masih Fluktuatif Dimana Anggaran kembali meningkat (Rp35,6 miliar, capaian 94,9%). Kinerja Skor Pola Pangan Harapan naik ke 85,29 (perbaikan). Cadangan pangan justru melonjak 293% dari target (indikasi distribusi stok tidak stabil). Indeks Birokrasi semakin menurun ke angka 16 → titik terburuk dalam 5 tahun. Ini menunjukkan pemulihan anggaran tidak serta-merta memperbaiki semua kinerja, khususnya aspek tata kelola birokrasi.

Pola Keterkaitan Anggaran dan Kinerja serta Efisiensi Penyerapan vs Hasil Kinerja yaitu saat serapan anggaran tinggi (2020–2022), capaian kinerja cenderung stabil. Saat serapan menurun (2023), banyak indikator juga turun. Tidak semua indikator tergantung besar anggaran yaitu Inflasi pangan bergejolak tetap terkendali meski anggaran naik-turun → faktor eksternal (pasar, harga komoditas). Cadangan pangan sangat fluktuatif, kadang jauh melampaui target, sehingga perlu manajemen lebih baik, bukan sekadar penambahan dana.

Aspek kelembagaan paling terdampak yaitu indeks birokrasi justru menurun tajam meskipun anggaran 2024 membaik. Ini menandakan perlu perbaikan sistem dan tata kelola, bukan hanya soal anggaran. Berdasarkan hasil pembahasan diatas menunjuka tahun 2020–2022 anggaran tinggi kinerja relatif stabil, efisiensi baik. Tahun 2023 penurunan anggaran drastis kinerja banyak indikator ikut menurun. Tahun 2024 Anggaran pulih sebagian capaian keuangan membaik, namun kinerja tidak semua ikut membaik (terutama birokrasi). Maka, hubungan anggaran dan kinerja memang erat, tetapi tidak linier. Beberapa indikator sangat dipengaruhi oleh serapan anggaran (misalnya penanganan rawan pangan, skor ketersediaan), sementara indikator lain lebih terkait dengan faktor manajerial dan tata kelola (misalnya indeks birokrasi).

2.4.2 Kemandirian Pangan

Pangan merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin oleh negara. Pangan berperan penting dalam mencegah kelaparan dan memenuhi kebutuhan fisik dasar, dengan dampak nyata pada kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas manusia. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penyelenggaraan pangan bertujuan memenuhi kebutuhan pangan secara merata, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal serta menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Ketahanan pangan nasional diharapkan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Kemandirian pangan adalah kemampuan suatu wilayah, komunitas, atau negara untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan tanpa ketergantungan besar terhadap impor, baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas pangan. Pencapaian kemandirian pangan mensyaratkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan sumber pangan lokal yang berdaya saing dan bernilai gizi tinggi. Pemerintah menggunakan dua indikator utama untuk mengukur kemandirian pangan di Indonesia, yakni Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Prevalence of Undernourishment (PoU).

Situasi ketahanan pangan nasional digambarkan melalui nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Prevalence of Undernourishment (PoU). Pada tahun 2023, IKP nasional meningkat, sementara PoU menurun. Tahun 2024, pemerintah menargetkan PoU nasional turun ke angka 7,21%, agar pada tahun 2029 mencapai 4,41% sesuai RPJMN.

Indonesia, dan khususnya Sulawesi Tengah, terus menghadapi tantangan ketahanan pangan, seperti perubahan iklim, degradasi lahan, distribusi yang belum merata, food loss dan food waste, serta tingginya konsumsi makanan instan yang berdampak pada kualitas gizi. Optimalisasi produksi dan distribusi pangan lokal tetap menjadi fokus, seiring pertambahan jumlah penduduk.

A. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

IKP adalah ukuran komposit dari beberapa indikator ketahanan pangan, meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. IKP menggambarkan status ketahanan pangan suatu daerah melalui sembilan indikator utama, seperti rasio konsumsi terhadap ketersediaan, persentase penduduk miskin, tingkat stunting balita, dan status gizi masyarakat. Semakin tinggi IKP, semakin baik status kemandirian dan ketahanan pangan suatu wilayah. Pada tahun 2024, IKP rata-rata nasional mengalami peningkatan, sebagian besar kabupaten/kota berada dalam kategori tahan pangan. Namun beberapa wilayah di Indonesia Timur, termasuk sebagian provinsi kepulauan, masih tergolong sangat rentan pangan.

IKP sangat penting dalam perencanaan pembangunan dan penentuan prioritas intervensi program, baik nasional maupun daerah. Pemerintah menetapkan target

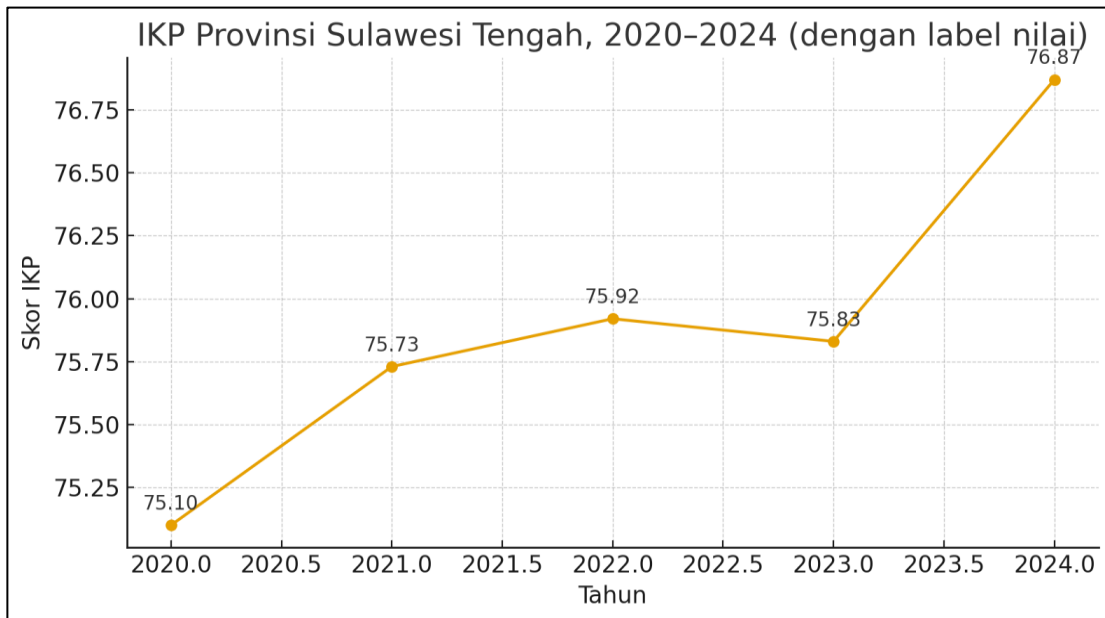
kenaikan IKP dalam RPJMN untuk memperkuat kemandirian pangan, menurunkan stunting, dan mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan Nasional tahun 2024, Sulawesi Tengah memperoleh nilai IKP 76,87 (kategori baik, mendekati kelompok sangat tahan dalam skala nasional). Kota Palu sebagai ibukota provinsi mencatat IKP 82,43, kategori sangat baik, menandakan ketahanan pangan yang cukup kuat di wilayah ini. Kabupaten Banggai, Poso, Buol, Morowali, dan Morowali Utara juga memiliki nilai IKP yang tinggi, melampaui angka provinsi dan nasional. Namun, beberapa kabupaten seperti Banggai Laut (IKP 51,91) dan Banggai Kepulauan (IKP 66,50) masih dalam kategori rawan pangan dan perlu penanganan serius.

Tabel 5. Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dan 13 Kabupaten/Kota

No	Uraian	Nilai IKP				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sulawesi Tengah	75,10	75,73	75,92	75,83	76,87
2	Banggai Laut	48,94	49,41	50,35	50,77	51,91
3	Banggai Kepulauan	63,98	61,89	60,87	53,61	66,50
4	Banggai	85,38	85,15	85,73	85,72	85,14
5	Tojo Una-Una	77,52	77,90	74,80	76,93	73,78
6	Morowali Utara	78,31	79,63	79,50	82,52	81,21
7	Morowali	82,44	81,98	81,51	82,36	81,44
8	Poso	84,22	83,76	82,50	83,57	84,60
9	Parigi Moutong	75,05	75,03	76,83	77,59	78,91
10	Donggala	69,83	73,55	75,30	72,27	73,97
11	Toli-Toli	78,66	78,95	78,64	88,20	79,39
12	Buol	77,56	80,71	82,79	83,11	79,97
13	Sigi	74,75	75,54	77,94	78,17	80,06
14	Palu	79,63	80,92	79,94	80,05	82,43

IKP Provinsi Sulawesi Tengah bergerak stabil-positif: 2020=75,10, 2021=75,73, 2022=75,92, sempat koreksi ringan 2023=75,83, dan menguat kembali 2024=76,87. Kenaikan bersih +1,77 poin mengindikasikan perbaikan bertahap pada dimensi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Ketahanan provinsi secara konsisten berada pada kelas “tahan” (skor menengah-atas), bukan kategori rendah. Secara substantif, pola ini lazim muncul ketika variabel-variabel pemanfaatan akses air bersih, layanan kesehatan dasar, capaian pendidikan perempuan, dan penurunan stunting membaik, sementara variabel ketersediaan (rasio konsumsi terhadap ketersediaan) terjaga sehingga gejolak 2022 secara nasional tidak mendorong penurunan berarti di Sulteng. Berikut Grafik Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024



Gambar 4. Grafik Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024

Rentang IKP kabupaten/kota tahun 2024 masih lebar ($\pm 33,2$ poin): Banggai Laut 51,91 (terendah) vs Banggai 85,14 (tertinggi). Poso (84,60) dan Palu (82,43) mengisi kluster atas; Morowali Utara (81,21) dan Morowali (81,44) juga relatif kuat. Di sisi lain, Banggai Kepulauan (66,19) dan Tojo Una-Una (73,78) berada di bawah rerata provinsi 76,87.

Perubahan 2020→2024 memperlihatkan beberapa kemajuan nyata: Sigi (+5,31), Donggala (+4,14), Palu (+2,80), Parigi Moutong (+3,86), serta Banggai Kepulauan (+2,21) pasca fase melemah. Namun Tojo Una-Una mengalami pelemahan (-3,74), dan Banggai Laut meski naik (+2,97) masih menjadi kantong kerentanan. Implikasi kebijakan: (i) memperkecil gap internal melalui intervensi terarah di Banggai Laut & Tojo Una-Una; (ii) replikasi praktik baik dari kabupaten kuat (Banggai, Poso, Palu) terkait logistik, tata niaga, cold-chain, dan program gizi; (iii) amankan pilar ketersediaan di kabupaten defisit dengan strategi stok buffer dan pengurangan susut pascapanen. Indeks ketahanan pangan berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah tercantum pada gambar berikut.



Gambar 5. Grafik Bar Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kab/Kota tahun 2024

Secara metodologis, publikasi IKP Bapanas merilis skor pada level provinsi serta kabupaten/kota; tidak selalu tersedia satu angka “rata-rata nasional resmi” per tahun. Karena itu, perbandingan yang sah dilakukan dengan (a) posisi relatif antarprovinsi dan (b) dinamika makro nasional. Tahun 2022 menjadi stress test nasional: lebih dari separuh kab/kota secara nasional mengalami penurunan skor akibat tekanan rasio konsumsi terhadap ketersediaan dan kenaikan kemiskinan. Dalam konteks ini, Sulawesi Tengah tetap bertahan di ~75,9, sehingga terbilang resilien jika dibandingkan banyak daerah lain yang turun. Pada spektrum antarprovinsi, Sulteng konsisten di atas klaster rendah (mis. Papua & Papua Barat yang berada di kisaran 30–40an & 40–50an pada 2022) namun belum menyamai klaster teratas (Bali, Jateng, DKI di rentang ±83–88 pada 2023). Artinya, ruang peningkatan tetap terbuka, khususnya menuju skor ≥ 80 secara merata antarkabupaten. Berikut tabel kondisi Indeks ketahanan pangan beberapa Provinsi di Indonesia.

Tabel 6. Indeks Ketahanan Pangan Beberapa Provinsi di Indonesia

Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024*
Bali	84,54	83,82	85,19	87,65	—
Jawa Tengah	82,31	82,73	82,95	84,80	—
DKI Jakarta	77,97	78,01	78,25	83,80	—
DI Yogyakarta	80,67	81,43	80,88	83,17	—
Jawa Barat	76,78	77,79	77,55	82,19	—

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Rata-rata kenaikan IKP Sulteng selama 5 tahun terakhir berkisar antara -0,12% hingga 1,37% per tahun, secara umum lebih tinggi dari pertumbuhan nasional kecuali tahun 2023 saat Sulteng sempat menurun

tipis. Peningkatan paling signifikan pada Sulteng terjadi di 2024 yaitu sebesar 1,37%, sedangkan nasional di tahun yang sama naik 0,62%. Tahun 2023 adalah satu-satunya tahun Sulteng mengalami penurunan kecil sebesar -0,12%; nasional tetap bertumbuh positif pada periode yang sama. Berikut tabel perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional.

Tabel 7. Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional.

Tahun	IKP Sulteng	% Perubahan Sulteng	IKP Nasional	% Perubahan Nasional
2020	75,10	-	74,59	-
2021	75,73	0,84	74,70	0,15
2022	75,92	0,25	75,18	0,64
2023	75,83	-0,12	75,56	0,51
2024	76,87	1,37	76,03	0,62

Selama 2020-2024, IKP Sulteng stabil di atas rata-rata nasional, memberikan gambaran bahwa ketahanan pangan di provinsi ini cukup kuat dibandingkan rerata nasional. Seluruh kabupaten/kota di Sulteng juga menunjukkan tren positif, dengan perbaikan IKP khususnya di kabupaten yang sebelumnya rawan (Banggai Laut dan Banggai Kepulauan). Data ini menunjukkan keberhasilan strategi, intervensi program, serta inovasi daerah dalam menjaga ketahanan pangan, meskipun tantangan disparitas antar wilayah masih perlu diatasi.

Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam 5 tahun terakhir cenderung tumbuh lebih baik dibandingkan nasional, dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2024. Analisis kuantitatif menunjukkan tren pertumbuhan tahunan yang positif, sedangkan analisis deskriptif menguatkan posisi Sulteng sebagai salah satu wilayah dengan ketahanan pangan yang baik di Indonesia.

Faktor Pendorong dan Penghambat

- **Pendorong:** penguatan layanan gizi & kesehatan primer, perluasan akses air minum layak/sanitasi, peningkatan literasi & pendidikan perempuan, serta stabilisasi harga pangan pokok yang menurunkan proporsi pengeluaran pangan rumah tangga.
- **Penghambat:** ketimpangan logistik antarwilayah, volatilitas harga komoditas pokok tertentu, dan ketergantungan pasokan pada waktu/asal tertentu yang membuat **rasio konsumsi/ketersediaan** memburuk saat guncangan.

Rekomendasi Aksi (Menuju 80+)

- 1. Reduksi Ketimpangan (Prioritas 1: Banggai Laut & Tojo Una-Una).**
Program targeting keterjangkauan (bansos pangan cerdas, UMKM pangan), percepatan **air minum layak & sanitasi**, penguatan Puskesmas & layanan gizi 1000 HPK, serta edukasi perempuan usia 15+ (variabel IKP).
- 2. Replikasi Praktik Baik.**
Benchmarking lintas OPD untuk menyalin tata niaga, manajemen stok, dan jaringan cold-chain dari **Banggai/Poso/Palu** ke wilayah tertinggal.
- 3. Ketersediaan Berbasis Bukti.**
Monitoring **rasio konsumsi/ketersediaan** per komoditas kunci; optimasi produksi lokal, pengurangan losses, dan buffer stok di kabupaten defisit.
- 4. Quick Wins Teknis.**
 - a) Air minum layak;
 - b) Layanan kesehatan dasar & density nakes;
 - c) Program anti-stunting terintegrasi;
 - d) Edukasi gizi & literasi keuangan rumah tangga untuk menekan share pengeluaran pangan.

B. Prevalence of Undernourishment (PoU)

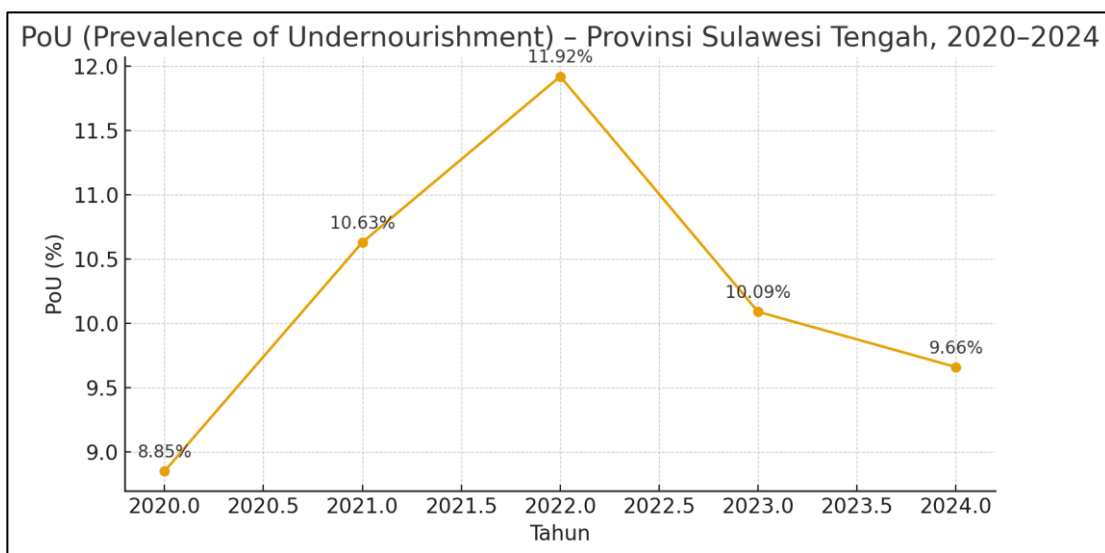
Tahun 2024, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) Sulawesi Tengah tercatat 9,66% (di atas rata-rata nasional 8,27%). Kota Palu (ibukota) memiliki PoU terendah, yaitu 5,72% pada tahun 2024, sedangkan Banggai Kepulauan tertinggi, yaitu 15,86%. Artinya, terdapat disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di Sulteng. Berikut tabel kondisi Prevalence of Undernourishment (PoU) Provinsi Sulawesi Tengah dan 13 Kab/Kota Tahun 2020-2024.

Tabel 8. Prevalence of Undernourishment (PoU) Provinsi Sulawesi Tengah dan 13 Kab/Kota Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Provinsi Sulawesi tengah	8,85	10,63	11,92	10,09	9,66
2	Palu	4,36	7,28	11,95	6	5,72
3	Morowali	4,97	7,03	6,69	7,9	7,55
4	Tolitoli	9,58	14,3	14,23	13,66	13,08
5	Banggai Laut	10,51	11,91	11,26	13,42	12,89
6	Sigi	10,66	12,56	14,12	14,11	13,49
7	Donggala	10,41	9,96	14,81	11,36	10,86
8	Bangkep	13,27	16,14	16,26	16,56	15,86
9	Tojo Una-Una	8,7	9,61	9,31	10,78	10,3
10	Banggai	8,15	11,91	11,85	9,95	9,52
11	Poso	7,31	9,29	8,98	7,36	7,06
12	Buol	8,06	10,44	10,03	8,48	8,10
13	Parigi Moutong	11,27	10,63	12,36	9,92	9,47

14	Morowali Utara	7,41	8,75	7,40	7,10	6,78
----	----------------	------	------	------	------	------

Pada level provinsi, PoU menunjukkan kurva naik-turun: 8,85% (2020) → 10,63% (2021) → 11,92% (2022) → 10,09% (2023) → 9,66% (2024). Artinya, setelah mencapai puncak 2022, kondisi membaik pada 2023–2024, tetapi angka 2024 masih lebih tinggi dibanding 2020 (+0,81 poin persentase). Secara substantif, pola ini konsisten dengan fase guncangan daya beli & pasokan (2021–2022) lalu pemulihan bertahap (2023–2024). Dengan PoU 2024 di 9,66%, tantangan ketidakcukupan konsumsi masih relevan, walau arah perbaikan terlihat. Dapat dilihat pada grafik berikut.



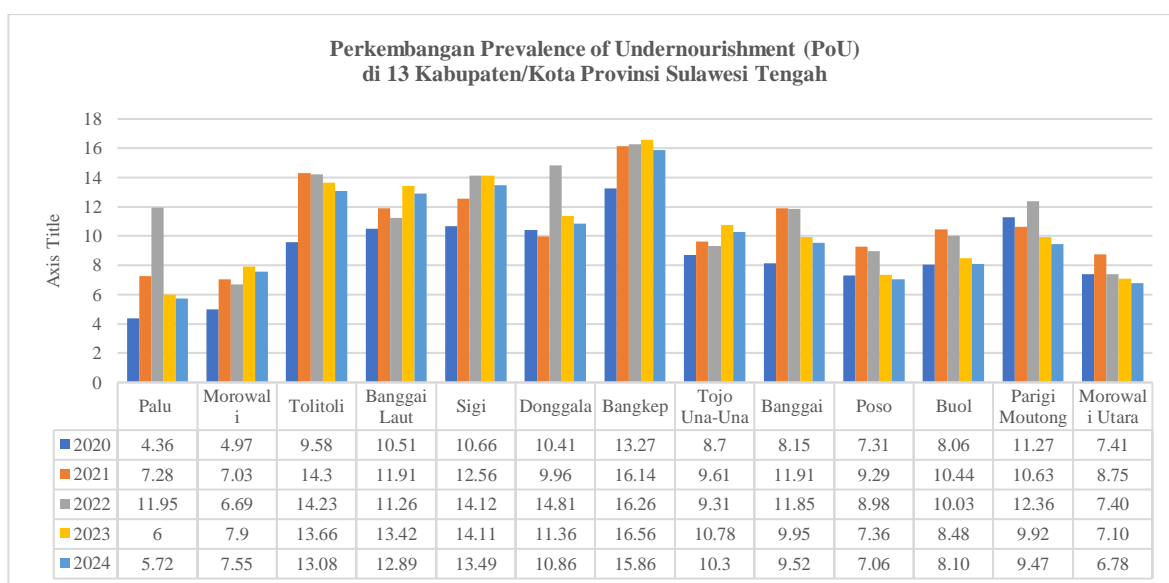
Gambar 6. Grafik Prevalence of Undernourishment (PoU) Provinsi Sulawesi Tengah

Terjadi kenaikan PoU dari tahun 2020 ke 2022, kemudian tren mulai menurun pada 2023 dan kembali turun di 2024. Secara kuantitatif, penurunan PoU Sulteng dari 2023 ke 2024 sebesar sekitar -4,26% (dari 10,09% ke 9,66%)—suatu perbaikan menuju target nasional, meski masih cukup tinggi dibanding propinsi dengan kerawanan pangan rendah. Melihat perubahan lima tahun, tampak siapa yang membaik dan siapa yang memburuk (angka positif = PoU naik/worse; negatif = turun/better):

- Memburuk paling besar (butuh remediasi agresif): Tolitoli +3,50 (9,58→13,08); Donggala +3,45 (10,41→13,86); Sigi +2,82 (10,66→13,48); Banggai Kepulauan +2,59 (13,27→15,86); Morowali +2,58 (4,97→7,55); Banggai Laut +2,38 (10,51→12,89). Ini menandakan kombinasi problem keterjangkauan (daya beli/struktur harga), ketersediaan (pasokan/volatilitas), dan/atau pemanfaatan (gizi, air-sanitasi) yang belum membaik pascapandemi.

- Stagnan/naik kecil: Buol +0,04 (8,06→8,10), Poso +1,16 (7,31→8,47), Banggai +1,45 (8,15→9,60), Tojo Una-Una +1,64 (8,70→10,34), Palu +1,36 (4,36→5,72). Kenaikan yang relatif kecil tetap perlu diawasi agar tidak berlanjut.
- Membaik (PoU turun): Parigi Moutong -1,80 (11,27→9,47) dan Morowali Utara -0,63 (7,41→6,78). Dua wilayah ini layak dijadikan studi praktik baik (apa yang bekerja: stabilisasi harga, layanan gizi, akses air bersih, program perlindungan sosial, dsb.) untuk direplikasi.

Berikut Grafi Bar Perkembangan Prevalence of Undernourishment (PoU) di 13 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah:



Gambar 7. Grafi Bar Perkembangan Prevalence of Undernourishment (PoU) di 13 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah

Tingkat PoU terendah 2024: Kota Palu (5,72%) dan Morowali Utara (6,78%)
 Tingkat PoU tertinggi 2024: Bangkep/Banggai Kepulauan (15,86%), Donggala (13,49%), Sigi (13,48%), Tolitoli (13,08%), dan Banggai Laut (12,89%) Selama lima tahun, sebagian besar kabupaten/kota mengalami fluktuasi PoU, tetapi beberapa wilayah seperti Kota Palu, Morowali, dan Buol berhasil menurunkan angka PoU pada 2024. Wilayah pesisir dan kepulauan (Bangkep, Banggai Laut, Tolitoli) secara konsisten menempati posisi dengan tingkat undernourishment tertinggi, mengindikasikan tantangan akses pangan dan gizi di daerah tersebut.

PoU Provinsi Sulawesi Tengah selama 2020-2024 secara konsisten selalu lebih tinggi dari target nasional yang ditetapkan dalam RPJMN dan Perpres, baik dalam angka level provinsi maupun sebagian besar kabupaten/kota. Upaya penurunan PoU di Sulteng memang sudah berjalan, namun tren masih di atas target. Penurunan pada 2023 dan 2024 menandakan kebijakan dan intervensi mulai efektif, meski gap terhadap target nasional tetap tinggi, terutama pada kabupaten kepulauan dan pesisir. Untuk

mencapai target nasional 5% pada 2024 dan 4,41% pada tahun 2029, Sulteng perlu meningkatkan intervensi khusus untuk kelompok rentan, akses pangan bergizi, serta optimalisasi distribusi pangan murah dan lokal.

PoU Provinsi Sulawesi Tengah dalam 5 tahun terakhir masih belum memenuhi target nasional, meski tren penurunannya sudah mulai terlihat terutama di 2023-2024. Fokus penanganan lebih agresif dan terarah sangat diperlukan agar Sulteng bisa mendekati dan memenuhi target penurunan undernourishment sesuai kebijakan nasional RPJMN dan SDGs. Berikut tabel perbandingan Prevalence of Undernourishment (PoU) Provinsi Sulaesi Tengah dan Nasional.

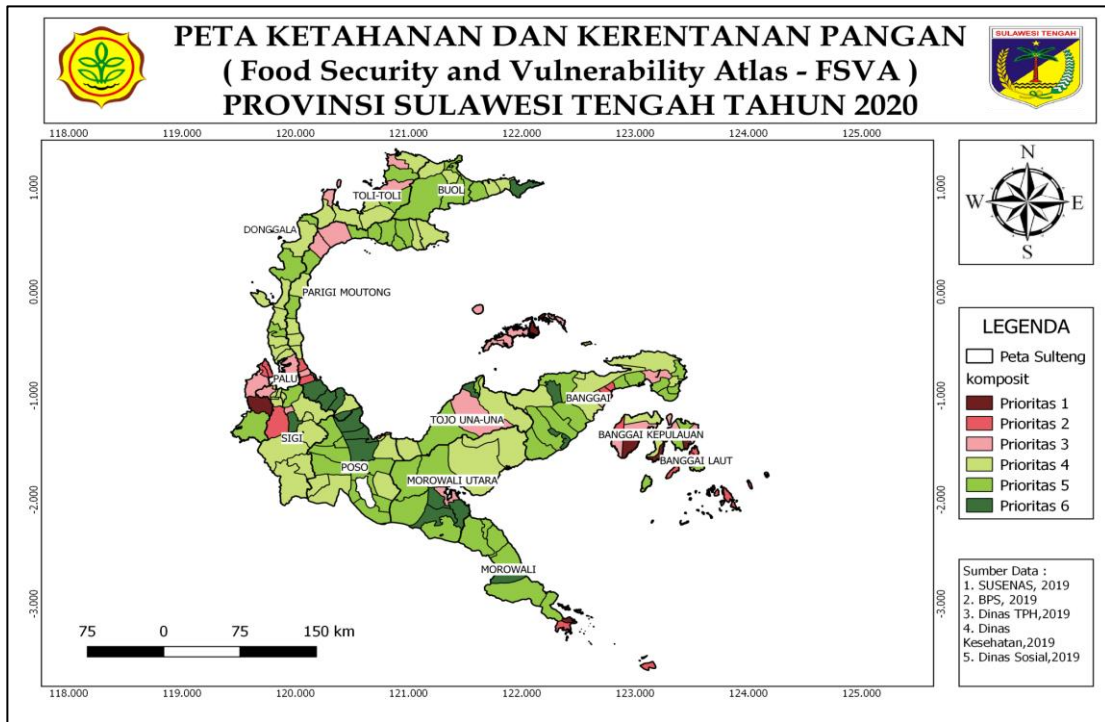
Tabel 9. Perbandingan Prevalence of Undernourishment (PoU) Provinsi Sulaesi Tengah dan Nasional

Tahun	PoU Sulteng (%)	Target Nasional (%)	Gap/Status
2020	8,85	8,0	Di atas target nasional
2021	10,63	7,5	Di atas target nasional
2022	11,92	6,5	Di atas target nasional
2023	10,09	6,0	Di atas target nasional
2024	9,66	5,0	Di atas target nasional

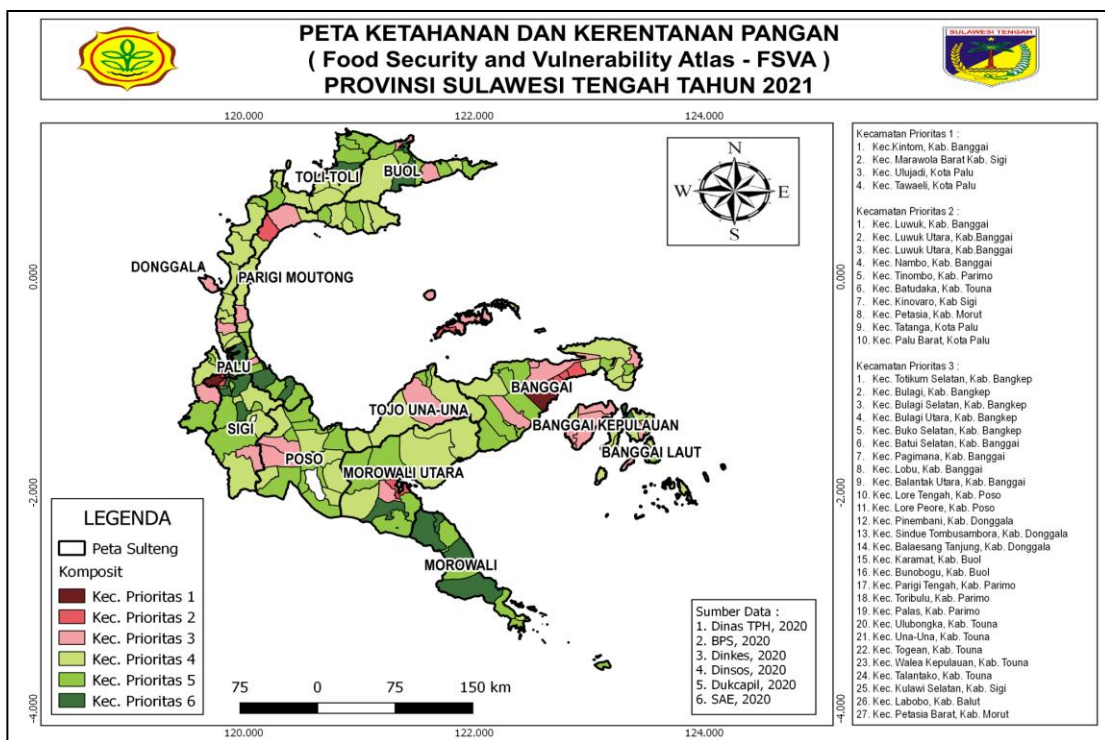
Sulawesi Tengah secara total kini masih menghadapi tantangan konsumsi pangan cukup, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan yang rawan pangan, serta tingkat stunting anak yang juga perlu terus ditekan demi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan tangguh. Kebijakan dan aksi ketahanan pangan daerah diarahkan pada optimalisasi produksi, penguatan distribusi, pemanfaatan pangan lokal, serta penurunan angka rawan pangan dan PoU. Dinas pangan daerah bersama lintas sektor menguatkan program pengawasan distribusi, pangan murah, intervensi ke daerah rawan, serta peningkatan gizi agar akses pangan berkualitas merata hingga pelosok Sulteng. Penajaman intervensi pada kabupaten/kota dengan PoU tinggi dan IKP rendah sangat diperlukan, sembari menjaga keberlanjutan pangan lokal dan peningkatan kualitas gizi penduduk Sulawesi Tengah.

2.4.3 Kondisi Umum

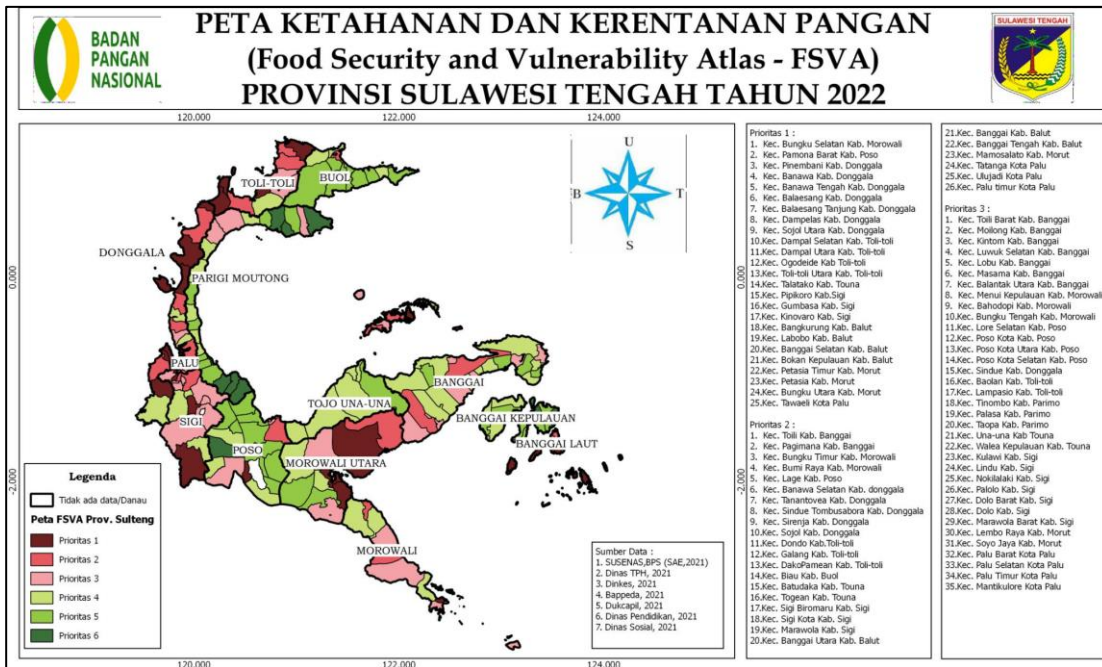
Kondisi umum ketahanan pangan provinsi sulawesi tenga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Terakhir dilihat dari aspek Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan Pangan dapat di jelaskan sebagai berikut:



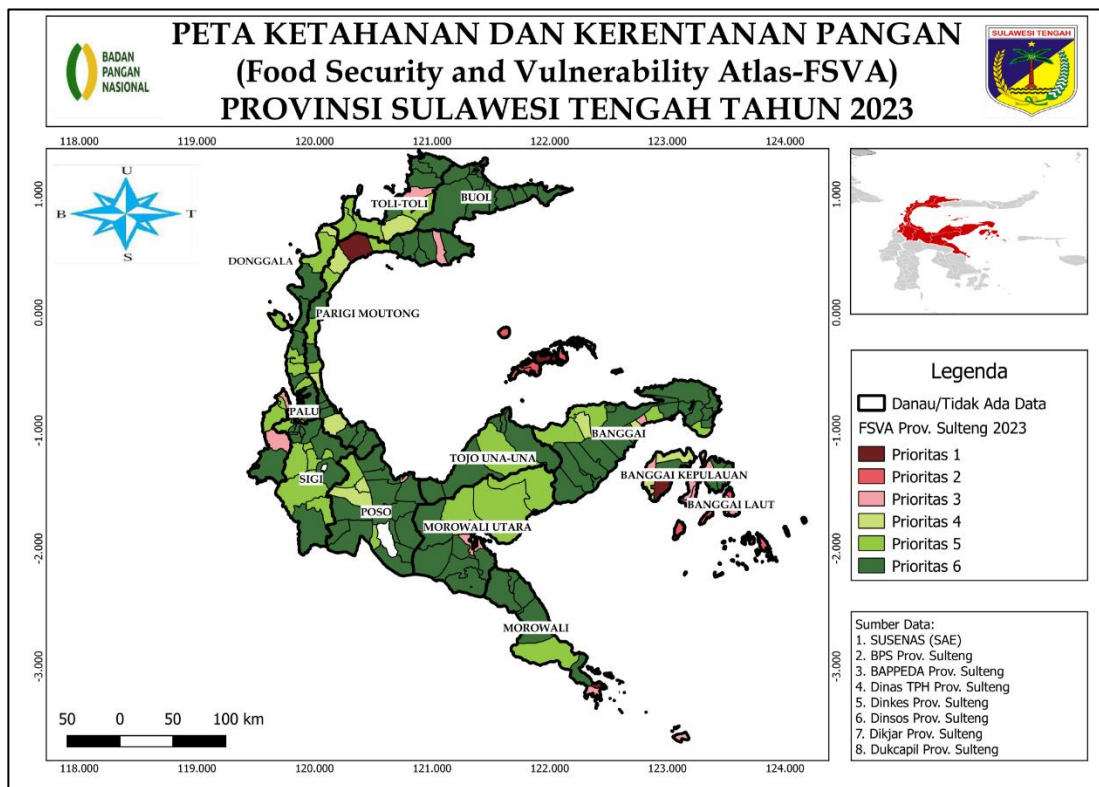
Gambar 8. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2020



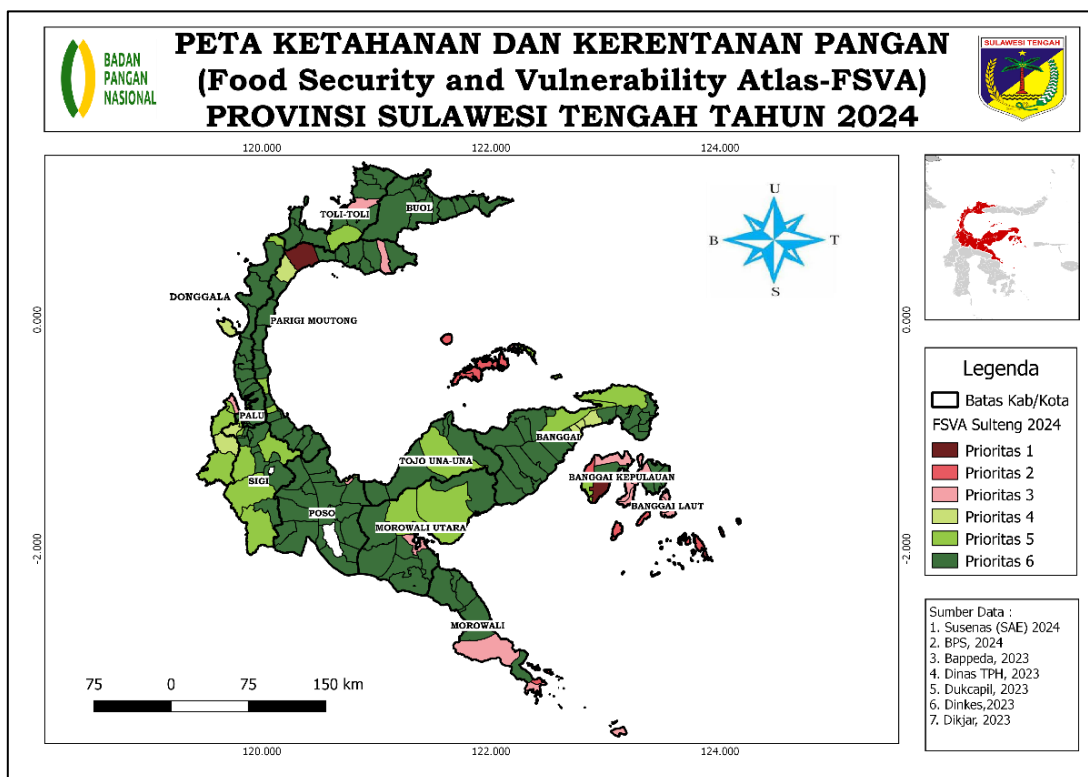
Gambar 9. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2021



Gambar 10. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2022



Gambar 11. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2023



Gambar 12. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024

2.4.3.1 Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan adalah pilar pertama ketahanan pangan yang memastikan pangan cukup jumlahnya, berkesinambungan, dan terjangkau bagi seluruh penduduk. Dinamika cuaca ekstrim, gangguan rantai pasok, volatilitas harga, dan tantangan geografis (wilayah kepulauan/remote) menuntut strategi ketersediaan yang adaptif, berbasis data, dan place-based. RENSTRA ini menjadi pedoman 5-tahunan bagi Perangkat Daerah Urusan Pangan untuk mencapai ketahanan pasok yang stabil sekaligus mendukung penurunan kerentanan konsumsi (PoU) dan inflasi pangan.

Ketersediaan pangan untuk jenis pangan yang menjadi kewenangan urusan pangan di daerah berdasarkan Badan Pangan Nasional yaitu pangan pokok & strategis (beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, minyak goreng, bawang, cabai, telur & daging ayam ras, daging ruminansia; beberapa kasus termasuk ikan tertentu) karena efeknya besar ke inflasi dan ketahanan nasional.

Ketersediaan pangan utama adalah salah satu indikator penting dalam menentukan ketahanan pangan suatu negara atau wilayah. Pangan utama yang dimaksud dalam tabel ini mencakup beras, jagung, dan kedelai, yang merupakan bahan pangan pokok di Indonesia. Ketersediaan pangan ini menggambarkan jumlah pangan yang tersedia untuk setiap individu dalam suatu periode tertentu, yang dinyatakan dalam satuan kilogram per kapita per tahun (kg/Kap/Thn).

Tabel 10. Data Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2020-2024

BAHAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
BERAS (kg/Kap/Thn)	147,17	170,28	139,59	107,86	103,32
JAGUNG (kg/Kap/Thn)	161,90	114,36	100,00	2,31	24,14
KEDELAI (kg/Kap/Thn)	0,90	1,31	2,59	3,78	2,72

Berdasarkan tabel Ketersediaan pangan utama diatas, dapat dilihat ketersediaan tiga bahan pangan utama dari tahun 2020 hingga 2024. Dari data yang disajikan, ketersediaan pangan utama seperti beras, jagung, dan kedelai menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup besar. Meskipun beras dan kedelai mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada beberapa tahun, jagung mengalami penurunan drastis, terutama pada tahun 2023. Penurunan ini berpotensi membahayakan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga perlu adanya kebijakan yang lebih baik untuk mengatur produksi dan distribusi pangan utama. Pemerintah dan pihak terkait perlu mengantisipasi hal ini dengan perencanaan yang matang, untuk memastikan setiap bahan pangan utama dapat tersedia dengan cukup di masa depan.

Tabel 11. Ketersediaan enrgi, Protein dan Lemak Perkapita Per Hari tahun 2020-2024

Tahun	Energi		Protein		Lemak		SKOR PPH
	Ketersediaan (kkal/kap/hr)	Ketersediaan Terhadap Rekomendasi (%)	Ketersediaan (kkal/kap/hr)	Ketersediaan Terhadap Rekomendasi (%)	Ketersediaan (kkal/kap/hr)	Ketersediaan Terhadap Rekomendasi (%)	
2020	5647	235,29	100,11	158,90	208,26	330,57	58,76
2021	5309	221,21	118,73	188,46	183,46	291,21	90,46
2022	3766	156,92	87,34	138,63	125,39	199,03	83,20
2023	3474	144,75	110,57	175,51	146,71	232,87	79,69
2024	3046	126,92	73,60	116,83	110,31	175,10	78,72

Berdasarkan analisis ketersediaan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan merujuk pada Widyakara Nasional Pangan dan Gizi (WNPG), dapat disimpulkan bahwa meskipun ada beberapa fluktuasi positif dalam ketersediaan energi, protein, dan lemak pada tahun tertentu, namun terdapat penurunan yang mengkhawatirkan pada beberapa tahun terakhir. Penurunan ini dapat berdampak pada pemenuhan gizi yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan produksi pangan lokal, memperbaiki distribusi pangan, serta edukasi tentang pentingnya keberagaman konsumsi pangan untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

2.4.3.2 Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan adalah kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan, baik dari sisi akses ekonomi maupun fisik, sehingga pangan dapat dicapai atau dibeli dengan mudah sesuai kemampuan daya beli mereka. Keterjangkauan pangan merupakan salah satu pilar penting dalam ketahanan pangan yang memastikan masyarakat tidak hanya tersedia pangan tetapi juga mampu memilikinya secara ekonomis.

Faktor yang memengaruhi keterjangkauan pangan meliputi daya beli masyarakat, stabilitas harga pangan, distribusi pangan yang merata, serta akses fisik ke sumber pangan terutama di daerah pedesaan. Fluktuasi harga pangan dan ketimpangan sosial-ekonomi dapat memperburuk keterjangkauan pangan, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Upaya untuk meningkatkan keterjangkauan pangan termasuk penetapan harga pangan yang terjangkau, program subsidi pangan, distribusi bantuan pangan, penguatan sistem distribusi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat agar daya beli meningkat. Selain itu, stabilisasi harga pangan dan pengelolaan cadangan pangan juga sangat penting dalam menjaga keterjangkauan pangan secara berkelanjutan.

Jadi, keterjangkauan pangan adalah aspek penting agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pangan yang cukup, bergizi, dan aman tanpa terbebani oleh harga yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

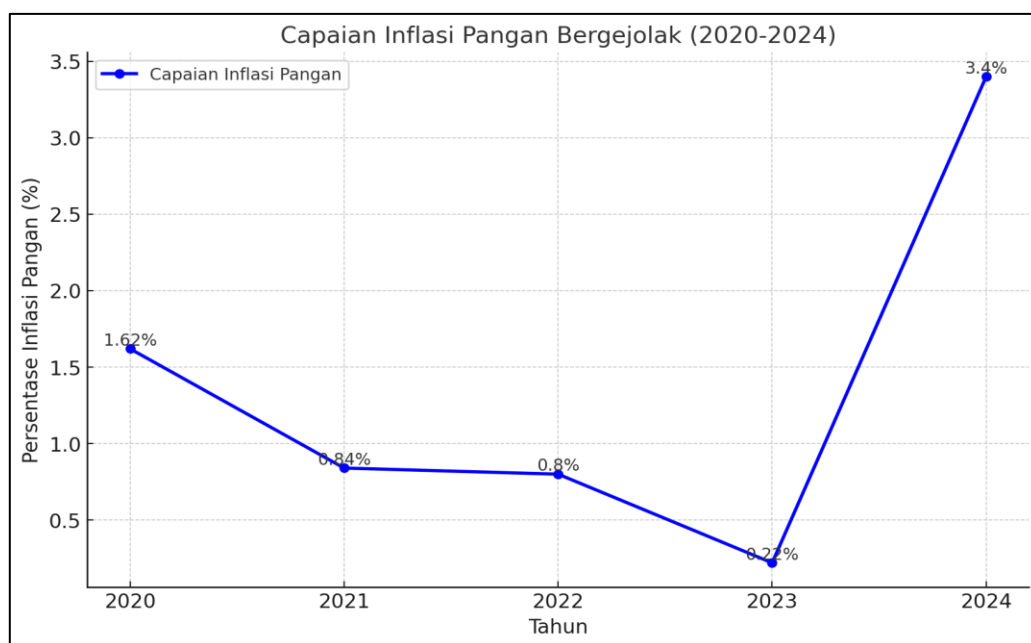
Keterjangkauan pangan merujuk pada kemampuan masyarakat untuk membeli pangan yang mereka butuhkan dengan harga yang wajar. Inflasi pangan bergejolak, yang ditandai dengan fluktuasi harga pangan yang tajam, dapat memengaruhi keterjangkauan pangan secara signifikan. Ketika inflasi pangan bergejolak dan harga pangan meningkat, daya beli masyarakat akan tertekan. Masyarakat, khususnya kelompok rentan (misalnya, keluarga berpendapatan rendah atau pekerja informal), akan kesulitan untuk membeli pangan yang mereka butuhkan. Ini dapat memperburuk masalah malnutrisi atau kekurangan gizi, karena mereka mungkin terpaksa membeli pangan yang lebih murah namun kurang bergizi.

Keterjangkauan pangan yang baik adalah salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas hidup masyarakat. Jika harga pangan tidak terjangkau, masyarakat mungkin terpaksa mengurangi konsumsi pangan, memilih makanan yang kurang bergizi, atau bahkan mengorbankan kebutuhan lainnya seperti pendidikan atau kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Untuk menjaga keterjangkauan

pangan meskipun ada inflasi pangan yang bergejolak, beberapa langkah berikut dapat diambil:

- **Diversifikasi Produksi Pangan Lokal:** Salah satu cara untuk mengurangi dampak inflasi pangan bergejolak adalah dengan meningkatkan produksi pangan lokal. Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan domestik, yang dapat mengurangi fluktuasi harga pangan.
- **Subsidi Pangan:** Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada kelompok rentan untuk membantu mereka mengakses pangan yang bergizi dengan harga yang lebih terjangkau. Misalnya, program bantuan sosial atau subsidi pangan dapat diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat.
- **Peningkatan Infrastruktur Pangan:** Investasi dalam infrastruktur pangan, seperti distribusi yang efisien, penyimpanan yang lebih baik, dan teknologi pertanian yang lebih maju, dapat mengurangi pemborosan pangan dan menjaga harga tetap stabil meskipun ada fluktuasi pasokan.

Inflasi pangan bergejolak dapat berdampak besar pada keterjangkauan pangan, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Ketika harga pangan meningkat, masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, kebijakan yang dapat mengurangi dampak inflasi pangan bergejolak, seperti meningkatkan produksi pangan lokal, subsidi pangan, dan memperbaiki infrastruktur pangan, sangat penting untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi semua lapisan masyarakat. Berikut Grafik Inflasi Pangan Bergejolak Tahun 2020-2024



Gambar 13. Inflasi Pangan Bergejolak Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020-2024

Berikut Tabel Perkembangan Harga Pangan Strategisi tahun 2020-2024:

Tabel 12. Perkembangan Harga Pangan Strategisi tahun 2020-2024

NO	KOMODITAS	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2025
1	Beras Premium	11.528	10.546	12.060	14.846	15.707
2	Beras Medium	10.546	9.207	10.643	12.468	13.511
3	Kedelai Biji Kering	10.096	11.200	13.841	13.862	12.663
4	Bawang Merah	41.152	22.666	43.355	34.747	40.959
5	Bawang Putih	37.192	26.611	32.028	40.697	46.838
6	Cabai Merah Keriting	31.600	38.246	28.583	66.765	43.516
7	Cabai Rawit Merah	38.817	60.706	52.790	118.551	53.457
8	Daging Sapi	121.107	106.054	136.867	136.256	133.032
9	Daging Ayam Ras	34.817	30.348	36.001	35.206	34.811
10	Telur Ayam Ras	27.475	21.773	29.139	28.699	29.692
11	Gula Pasir	16.175	12.645	15.107	17.538	18.853
12	Minyak Goreng	-	14.790	17.831	18.376	18.905
13	Tepung Terigu	9.067	-	11.261	10.984	10.217
14	Minyak Goreng Curah	14.570	-	14.421	14.962	15.228
15	Jagung Pipilan Kering	6.648	-	-	6.800	6.167
16	Ikan Kembung	-	-	-	31.830	32.033
17	Ikan Tuna	-	-	-	30.467	30.707
18	Ikan Bandeng	-	-	-	31.313	29.637
19	Garam Beryodium	-	-	-	10.436	-
20	Tepung Terigu Kemasan	-	-	-	13.955	12.836

2.4.3.3 Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan merupakan aspek penting dalam ketahanan pangan yang mengacu pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan tubuh untuk menyerap serta memanfaatkan zat gizi yang terkandung dalam bahan pangan. Pemanfaatan pangan tidak hanya melibatkan konsumsi pangan, tetapi juga meliputi proses pengolahan, penyimpanan, penyajian, serta kebersihan yang sangat berpengaruh terhadap nilai gizi makanan.

Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Pangan yaitu kualitas pangan dan keamanan makanan: Pengolahan dan penyimpanan yang baik dapat menjaga kandungan gizi dan mencegah kontaminasi yang berbahaya. Status kesehatan dan gizi individu: Kondisi kesehatan, seperti penyakit infeksi atau gangguan pencernaan, dapat mengurangi efisiensi penyerapan nutrisi. Pendidikan dan kebiasaan

makan: Pengetahuan tentang gizi dan pola makan seimbang sangat mempengaruhi cara pemanfaatan pangan dalam keluarga. Ketersediaan air bersih dan sanitasi: Air bersih sangat penting dalam proses pengolahan dan konsumsi pangan yang aman dan higienis.

Pemanfaatan pangan merupakan pilar yang memastikan ketersediaan pangan tidak hanya secara kuantitas tetapi juga berkualitas, sehingga setiap individu dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Upaya terpadu antara edukasi, teknologi, dan kebijakan diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber pangan yang ada.

Tabel 13. Perkembangan Konsumsi Energi, Konsumsi Protein dan Skor PPH Konsumsi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015 – 2024

No	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ENERGI (Kkal/Kap/Hari)	2.018	2.039,8	2.037,2	2.055	2.032,80
2	PROTEIN (Gram/Kap/Hari)	57,0	57,7	57,6	59,0	60,58
3	SKOR PPH KONSUMSI	82,2	81,6	80,6	81,2	85,29

Data Tabel diatas menunjukkan tren positif dalam konsumsi energi, protein, dan skor pola pangan harian (PPH) di masyarakat Sulawesi Tengah selama lima tahun terakhir. Konsumsi energi relatif stabil di sekitar 2.000 Kkal per kapita per hari, menunjukkan kebutuhan kalori dasar masyarakat umumnya tercukupi. Konsumsi protein juga meningkat, dari 57 gram per kapita per hari pada tahun 2020 menjadi sekitar 60,58 gram pada 2024. Peningkatan ini penting untuk menunjang pertumbuhan, pemeliharaan jaringan tubuh, dan kesehatan secara umum. Skor PPH konsumsi, yang mengukur kualitas diet harian, juga membaik dari 82,2 pada 2020 menjadi 85,29 pada 2024. Ini menandakan peningkatan pola konsumsi yang lebih seimbang dan bergizi.

Pemanfaatan pangan yang baik tercermin dari kondisi ini dimana masyarakat dapat mengakses dan mengolah bahan pangan secara optimal sehingga memenuhi kebutuhan gizi. Peningkatan pemanfaatan pangan perlu terus didukung dengan edukasi gizi, diversifikasi makanan, dan peningkatan akses terhadap pangan bergizi. Dengan pemanfaatan yang optimal, risiko malnutrisi dapat dikurangi dan kesehatan masyarakat meningkat.

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pangan Provinsi Sulawesi tengah

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar mendukung ketersediaan pangan, baik dari subsektor pertanian, perikanan, maupun perkebunan. Namun, dalam pelaksanaan tugas, Dinas Pangan menghadapi berbagai permasalahan strategis sebagai berikut:

Permasalahan Utama

Berikut rumusan permasalahan tiga pilar ketahanan pangan yang disesuaikan dengan kondisi ketahanan pangan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) secara umum.

1. Ketersediaan Pangan

2. Ketersediaan pangan pokok dan strategis belum stabil dan berkelanjutan
 - Produksi sangat dipengaruhi iklim ekstrem, bencana, dan gangguan hama-penyakit, sementara kapasitas adaptasi petani masih terbatas.
 - Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dan beberapa komoditas impor tertentu masih cukup tinggi sehingga rentan gejolak pasokan dan harga.
3. Optimalisasi sumber daya lahan dan sarana produksi pangan belum maksimal
 - Masih terdapat lahan potensial yang belum tergarap optimal dan infrastruktur (irigasi, alsintan, gudang, jalan usaha tani) belum memadai.
 - Akses terhadap input produksi (benih unggul, pupuk, teknologi) belum merata dan biaya produksi relatif tinggi.
4. Cadangan pangan pemerintah daerah dan sistem logistik belum kuat
 - Volume dan sebaran cadangan pangan pemerintah daerah belum memadai untuk mengantisipasi krisis, bencana, dan gejolak harga.
 - Sistem rantai dingin, penyimpanan, dan pengolahan pascapanen pangan strategis (termasuk protein hewani dan hortikultura) masih terbatas.

2. Keterjangkauan Pangan

1. Akses ekonomi masyarakat terhadap pangan bergizi masih timpang
 - Kelompok miskin, rentan, dan yang berada di wilayah terpencil/kepulauan masih menghadapi keterbatasan daya beli untuk memperoleh pangan layak dan bergizi.
 - Inflasi pangan dan fluktuasi harga komoditas strategis masih menjadi tekanan utama bagi rumah tangga berpendapatan rendah.
2. Distribusi pangan antar wilayah belum efisien dan merata

- Biaya distribusi tinggi karena kondisi infrastruktur dan geografi Sulteng (pegunungan, kepulauan) menyebabkan disparitas harga antar kabupaten/kota.
 - Mekanisme integrasi antara sentra produksi dan pusat konsumsi, termasuk pemanfaatan teknologi logistik dan informasi pasar, belum optimal.
3. Kelembagaan dan pelaku usaha pangan lokal belum cukup kuat
- BUMD pangan, koperasi, UMKM pengolahan pangan, Kios Pangan dan kelembagaan petani belum berperan maksimal sebagai penghubung rantai pasok yang menekan biaya dan menjaga pasokan.
 - Keterlibatan sektor swasta dalam investasi rantai nilai pangan (produksi–pascapanen–distribusi–ritel) masih perlu diperluas.

3. Pemanfaatan Pangan

1. Pola konsumsi belum beragam, bergizi seimbang, dan aman
 - Konsumsi masih didominasi satu sumber karbohidrat (beras), dengan asupan protein hewani, sayur, dan buah yang belum memenuhi rekomendasi gizi.
 - Pemahaman dan praktik keamanan pangan rumah tangga (penyimpanan, pengolahan) belum menyeluruh.
2. Pemanfaatan pangan lokal bergizi belum optimal
 - Potensi pangan lokal (umbi, sorgum, jagung, sagu, hasil perikanan, dan hortikultura) belum secara luas diintegrasikan ke pola konsumsi harian masyarakat.
 - Inovasi olahan pangan lokal dan daya saing produk (kemasan, standar mutu, pemasaran) masih terbatas.
3. Kontribusi sektor pangan terhadap perbaikan gizi (stunting, anemia, dsb.) masih bisa ditingkatkan
 - Sinergi program pangan dengan program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial (termasuk program makan bergizi gratis nasional) belum sepenuhnya terkoordinasi di tingkat daerah.
 - Intervensi spesifik dan sensitif gizi yang berbasis pangan lokal bergizi belum merata di seluruh kabupaten/kota.
4. Jaminan keamanan pangan pada masyarakat provinsi Sulawesi Tengah

- Pengawasan dan jaminan keamanan pangan segar dan olahan belum optimal, terutama di tingkat produsen kecil, pasar tradisional, pedagang kaki lima, dan rumah tangga
- Masih ditemui potensi cemaran biologis (bakteri patogen), kimia (residu pestisida, formalin, boraks, pewarna tekstil), dan fisik akibat praktik budidaya, pengolahan, dan penyimpanan yang belum memenuhi kaidah keamanan pangan
- Sistem sertifikasi/penjaminan keamanan pangan (IRT-PIRT, NKV, sertifikasi sarana distribusi, uji laboratorium) belum menjangkau secara luas pelaku usaha pangan skala kecil dan UMKM
- Literasi keamanan pangan masyarakat masih rendah, ditandai dengan masih kuatnya preferensi pada pangan murah tanpa mempertimbangkan keamanan dan mutu

Isu Strategis

Dari permasalahan pokok di atas, isu strategis yang dapat dimasukkan dalam RENSTRA Dinas Pangan antara lain:

1. Ketersediaan Pangan

- a. Penguatan ketahanan produksi dan cadangan pangan daerah di tengah risiko iklim dan geopolitik global.
- b. Percepatan pemanfaatan lahan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas serta diversifikasi produksi pangan lokal.
- c. Pengembangan sistem logistik dan cadangan pangan daerah yang adaptif terhadap bencana dan gejolak harga.

2. Keterjangkauan Pangan

- a. Peningkatan keterjangkauan pangan bergizi bagi kelompok miskin dan wilayah sulit, melalui penguatan instrumen stabilisasi dan perlindungan sosial pangan.
- b. Penguatan efisiensi distribusi dan integrasi pasar pangan antarwilayah di Sulawesi Tengah.
- c. Pengembangan kelembagaan dan pelaku usaha pangan lokal sebagai motor penggerak rantai nilai pangan daerah.

3. Pemanfaatan Pangan

- a. Percepatan pergeseran pola konsumsi menuju pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis pangan lokal.

- b. Optimalisasi peran sektor pangan dalam penurunan stunting, anemia, dan masalah gizi lainnya melalui sinergi lintas sektor.
- c. Penguatan inovasi, hilirisasi, dan promosi produk pangan lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan penerimaan masyarakat
- d. Penguatan sistem keamanan pangan segar dan olahan dari hulu ke hilir untuk melindungi konsumen dan mendukung kualitas gizi Masyarakat
- e. Perluasan jangkauan pengawasan dan sertifikasi keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan kecil, menengah, dan pangan siap saji
- f. Peningkatan literasi dan perubahan perilaku masyarakat terkait pemilihan, penyimpanan, dan pengolahan pangan yang aman di rumah tangga.

Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan strategis selama tahun 2025-2029 guna mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan dari hal tersebut dapat di simpulkan isu strategis pada tabel berikut

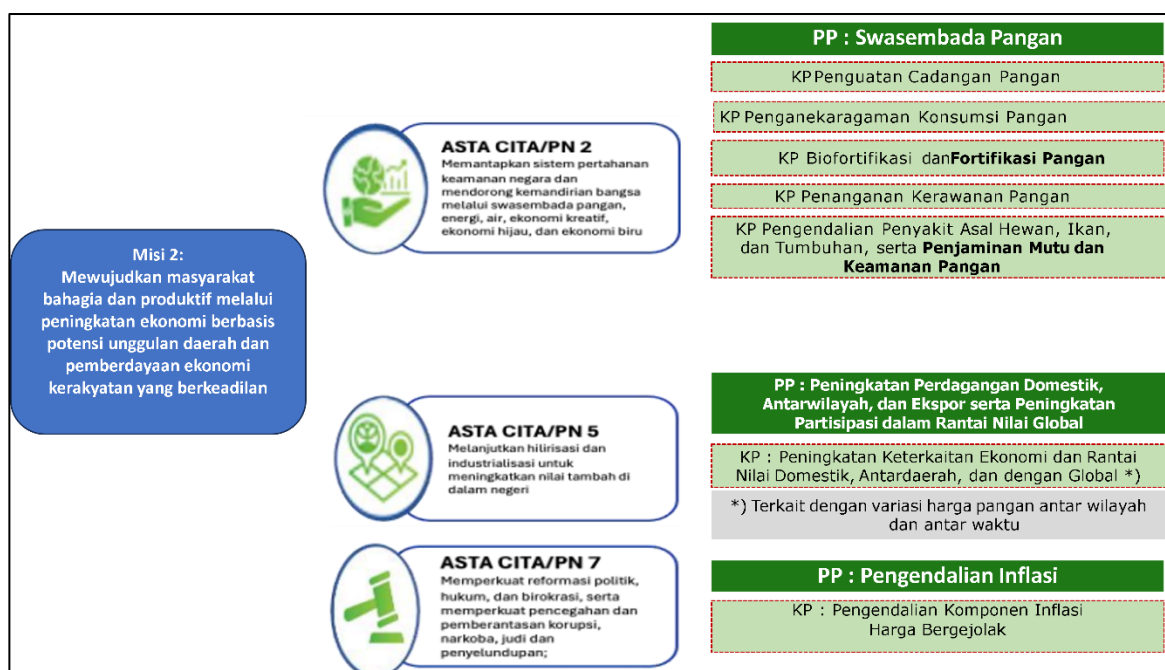
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka mendukung pencapaian **Visi Indonesia 2025-2029**, yaitu “*Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045*”, Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah menyesuaikan arah kebijakan dan program kerjanya dengan visi dan misi **Badan Pangan Nasional** serta visi-misi **RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah**.

Badan Pangan Nasional menempatkan diri sebagai institusi andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dalam menjalankan visinya, Badan Pangan Nasional menetapkan **9 misi strategis**, antara lain:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan
2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan
3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan
4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan
5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan
6. Menyelenggarakan bantuan pangan
7. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang
8. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar
9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal



Gambar 14. Diagram Keselarasan Misi

Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah adalah “**Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian Dan Industri Yang Maju Dan Berkelanjutan 2025-2029**” mendukung tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Misi provinsi yang relevan bagi Dinas Pangan khususnya mendukung misi ke-2, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja
2. **Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan**
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh, berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal, berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor

Tujuan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 selaras dengan Badan Pangan Nasional, yaitu Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau untuk memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan. **Sasaran jangka menengah** meliputi:

1. Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
2. Menurunnya Persentase Ketidak Cukupan Pangan (PoU)

Renstra Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 memiliki peranan penting dalam mendukung pencapaian Misi 2 RPJMD 2025-2029 melalui peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Menurunkan angka Persentase Ketidakcukupan pangan (PoU). Dalam pencapaian sasaran tersebut beberapa hal yang perlu dilaksanakan dinas pangan yaitu:

- a. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- b. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan
- c. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi
- d. Terwujudnya Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan
- e. Tersediannya Cadangan Pangan Pemerintah
- f. Menurunnya Daerah Rawan Pangan
- g. Meningkat Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan

h. Penguatan birokrasi Dinas Pangan yang profesional dan andal

Tujuan dan sasaran Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam RPJMD 2025-2029 ini sangat relevan dan strategis untuk mengatasi permasalahan pangan saat ini, sekaligus mendukung visi provinsi menuju pembangunan yang maju dan berkelanjutan. Dengan fokus pada ketersediaan pangan, Keterjangkauan Pangan dan pemanfaatan pangan. Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dapat membantu mewujudkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Selain itu, tujuan dan sasaran ini juga menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi yang menekankan pada Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan serta Mewujudkan Birokrasi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang andal. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar Logframe Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 sebagai berikut:



Gambar 15. Logframe Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029

Dengan demikian, kerangka keterkaitan antara RPJMD dan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah mengarah pada tujuan bersama yang saling mendukung, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Tabel 14. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pngan Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah											
- MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL INKLUSIF - MENINGKATNYA DAYA SAING DAERAH DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI SEKTORAL	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	76,87	77,87	78,87	79,87	80,87	81,87	82,87	
		Menurunnya Persentase Ketidak Cukupan Konsumsi Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	9,66	9,05	8,62	8,19	7,76	7,33	6,90	

Berikut adalah pembagian tahapan yang bisa dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada RENSTRA Dinas Pangan tahun 2025-2029.

TAHAPI (2026): Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Pangan

- Tujuan: Mengoptimalkan pengelolaan pangan lokal dan memperkuat infrastruktur distribusi pangan di wilayah rawan pangan.
- Sasaran: Meningkatkan kapasitas distribusi pangan dengan fokus pada wilayah pesisir dan daerah terpencil.
- Kegiatan:
 1. Penguatan cadangan pangan minimal 370 ton per tahun.
 2. Pembentukan dan penguatan sistem distribusi pangan berbasis teknologi.
 3. Pelatihan pengelola distribusi pangan dan petani.

TAHAPII (2027): Peningkatan Kualitas dan Keamanan Pangan

- Tujuan: Memastikan pangan yang didistribusikan memenuhi standar keamanan dan kualitas.
- Sasaran: Menurunkan kerawanan pangan dan meningkatkan pengawasan terhadap keamanan pangan.
- Kegiatan:
 1. Implementasi sistem jaminan mutu untuk pangan segar asal tumbuhan.
 2. Peningkatan pengawasan dan sertifikasi produk pangan.
 3. Peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha pangan.

TAHAPIII (2028): Diversifikasi Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan

- Tujuan: Mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan (beras) dan memperkenalkan alternatif pangan lokal.
- Sasaran: Meningkatkan skor pola pangan harapan dan memperkuat keberagaman konsumsi pangan masyarakat.
- Kegiatan:
 1. Program diversifikasi konsumsi pangan lokal.
 2. Peningkatan program pangan berbasis sumber daya lokal.
 3. Pengembangan dan promosi produk pangan lokal di pasar daerah.

TAHAPIV (2029): Penguatan Cadangan Pangan dan Kemandirian Pangan

- Tujuan: Mencapai kemandirian pangan melalui pengelolaan cadangan pangan yang berkelanjutan dan terjangkau.
- Sasaran: Menjamin ketersediaan pangan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan fokus pada ketahanan pangan yang berbasis sumber daya lokal.
- Kegiatan:
 1. Pengelolaan cadangan pangan yang stabil dan memenuhi kebutuhan lokal.
 2. Penyusunan dan implementasi kebijakan pangan yang berkelanjutan.
 3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga dan sektor swasta dalam pengelolaan pangan.

TAHAP V (2030): Pengawasan dan Evaluasi Ketahanan Pangan

- Tujuan: Mewujudkan pengawasan yang efektif terhadap distribusi pangan dan ketahanan pangan jangka panjang.
- Sasaran: Menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan dan evaluasi pencapaian target secara berkala.
- Kegiatan:
 1. Monitoring dan evaluasi hasil program pengelolaan pangan.
 2. Penyusunan laporan kinerja berdasarkan evaluasi dan rekomendasi perbaikan kebijakan.
 3. Peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan pangan.

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029, diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi ini berfokus pada penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan.

Kebijakan:

1. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan

- **Tujuan:** Meningkatkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.
- **Strategi:**
 - Meningkatkan ketersediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri.
 - Pengendalian impor dan ekspor pangan.
 - Penguatan cadangan pangan nasional.
 - Pemerataan distribusi dan penguatan logistik pangan
 - Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen
 - Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pasokan dan harga panga

2. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan

- **Tujuan:** Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pengelolaan sumber daya alam yang ada secara berkelanjutan.
- **Strategi:**
 - Perluasan akses informasi kerawanan pangan
 - Mitigasi potensi krisis pangan.
 - Penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan
 - Penyaluran bantuan pangan fortifikasi dan/atau biofortifikasi
 - Penguatan regulasi dan pengoptimalan upaya penyelamatan pangan
 - Pengembangan produk pangan lokal unggulan seperti jagung, kakao, kelapa, dan produk perikanan yang dapat meningkatkan ketahanan pangan lokal dan daya saing produk pangan.

3. Kebijakan Menjamin Pemanfaatan Pangan

- **Tujuan:** Meningkatnya kualitas konsumsi pangan.
- **Strategi:**
 - Penyediaan dan pemanfaatan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal
 - Edukasi Masyarakat untuk perubahan perilaku konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)
 - Mendorong pengembangan klaster pangan loka berbasis potensi wilayah dan kearifan local
 - Penguatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) pengolahan pangan lokal, termasuk pengembangan sistem insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha pengolahan pangan local
 - Penguatan data situasi konsumsi pangan
- **Tujuan:** Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar
- **Strategi:**
 - Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas keamanan dan mutu pangan segar
 - Penguatan standar keamanan dan mutu pangan segar
 - Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan segar

- Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di *pre market* dan *post market*
- Penguatan infrastruktur keamanan dan mutu pangan segar

4. Kebijakan Memperkuat Tata Kelola Birokrasi

- **Tujuan:** Mewujudkan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang andal.
- **Strategi:**
 - Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.
 - Penguatan sistem pengawasan internal.
 - Digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan.
 - Pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan akuntabel
 - Penataan organisasi dan penguatan kelembagaan
 - Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Strategi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah ini dirancang untuk mencapai tujuan yang ambisius, yaitu mewujudkan pilar ketahanan pangan melalui ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Dinas Pangan harus dapat mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan. Dengan demikian, melalui kebijakan yang strategis dan sinergi yang baik, Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dapat mengatasi tantangan ketahanan pangan dan mencapai keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 15. Program Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					25.969.830.119,02		27.791.790.901,59		29.825.261.749,56		32.100.679.729,06		34.653.394.335,32	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.944.830.119,02		12.405.090.901,59		12.859.029.749,56		13.636.906.669,06		15.176.655.872,32	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	16,34	45	50	11.944.830.119,02	60	12.405.090.901,59	65	12.859.029.749,56	68	13.636.906.669,06	72	15.176.655.872,32	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	16,34	45	50		60		65		68		72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					1.400.000.000,00		1.806.000.000,00		2.212.180.000,00		2.618.545.400,00		3.025.101.762,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur untuk mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (%)	100	100	100	1.400.000.000,00	100	1.806.000.000,00	100	2.212.180.000,00	100	2.618.545.400,00	100	3.025.101.762,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					9.225.000.000,00		9.949.700.000,00		10.219.622.000,00		10.504.864.760,00		10.792.762.912,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Panga Harapan Ketersediaan (Skor)	85,29	88,30	89,40	9.225.000.000,00	90,00	9.949.700.000,00	90,10	10.219.622.000,00	90,15	10.504.864.760,00	90,50	10.792.762.912,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (Skor)	85,29	88,30	89,40		90,00		90,10		90,15		90,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	668,70	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Inflasi pangan berjeolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan (%)	1,29	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					2.000.000.000,00		2.189.000.000,00		2.249.170.000,00		2.310.545.100,00		2.383.161.454,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	15,34	14,49	13,6	2.000.000.000,00	12,75	2.189.000.000,00	11,85	2.249.170.000,00	10,96	2.310.545.100,00	9	2.383.161.454,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					1.400.000.000,00		1.442.000.000,00		2.285.260.000,00		3.029.817.800,00		3.275.712.335,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	86,65	87	88	1.400.000.000,00	89	1.442.000.000,00	90	2.285.260.000,00	91	3.029.817.800,00	92	3.275.712.335,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
TOTAL KESELURUHAN					25969830119.02		27791790901.59		29825261749.56		32100679729.06		34653394335.32	

Penahapan dan program-program yang tercantum dalam Tabel 4.1 memberikan arahan yang jelas untuk mencapainya tujuan dan sasaran Dinas Pangan. Masing-masing program memiliki indikator dan target yang sejalan dengan RENSTRA, memastikan bahwa setiap tahapan dan anggaran yang disediakan diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah. Setiap program diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola, distribusi pangan, diversifikasi pangan lokal, serta pengawasan keamanan pangan, yang semuanya adalah elemen kunci untuk mencapai tujuan besar Dinas Pangan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta meningkatkan indeks ketahanan pangan dan menurunkan ketidakcukupan konsumsi pangan. Renstra yang disusun dengan program dan target yang jelas ini akan memperkuat peran Dinas Pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

4.2 Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dilakukan secara sistematis agar setiap tahapan pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai dengan indikator dan output yang jelas. Setiap program disusun berdasarkan sasaran RPJMD, kebutuhan masyarakat, serta relevansi dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan secara sistematis, Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dapat memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA akan terstruktur dengan baik dan terukur, serta dapat dipantau secara berkala untuk efektivitas pelaksanaan. Berdasarkan Tabel program, kegiatan, dan subkegiatan yang perlu dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam RENSTRA adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan			indeks ketahanan pangan (IKP)		Kepala Dinas Pangan
		Menurunnya Persentase Ketidak Cukupan Konsumsi Pangan			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))		Kepala Dinas Pangan
			Meningkatkan pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Persentase Pemenuhan Infrastruktur untuk mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Kepala Bidang Ketersediaan Pangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersediannya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
					Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
			Meningkatnya Skor Pola Pangan Haran Konsumsi		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Peningkatan DIVERSIFIKASI Ketahanan Pangan Masyarakat	Kepala Bidang Konsumsi dan Pengankaragaman Pangan
			Meningkatnya Skor Pola Pangan Haran Ketersediaan		Skor Pola Panga Harapan Ketersediaan		Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
			Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah		Peresentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah		Kepala Distribusi dan Cadangan Pangan
			Stabilnya Harga Pangan		Inflasi Pangan Bergejolak		Kepala Distribusi dan Cadangan Pangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
					Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
					Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
					Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
				Terkelolanya dan Seimbangny Cadangan Pangan		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
					Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
					Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
					Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
				Ditentukannya Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal Yang Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat		Penentuan Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal Yang Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
				Terlaksananya Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	
					Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Bidang Konsumsi dan Penganekecaragaman Pangan
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Bidang Konsumsi dan Penganekecaragaman Pangan
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Bidang Konsumsi dan Penganekecaragaman Pangan
				Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi Yang Ditetapkan	Penetapan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	Bidang Ketersedian dan Kerawanan Pangan
				Terkelolanya dan Seimbangny Cadangan Pangan Provinsi		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
					Kriteria dan status krisis pangan untuk skala provinsi yang Ditetapkan	Penetapan kriteria dan status krisis pangan untuk skala provinsi	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
					Jumlah Dokumen Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi Yang Ditetapkan	Penetapan Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi Yang Disusun	Penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
				Ditentukannya Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	
					Jumlah Dokumen mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur Yang Ditetapkan	Penetapan kebijakan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
			Menurunnya Daerah Rawan Pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan	
				Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
				Tertanganinya Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
					Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
					Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
			Meningkat Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan		Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Pengawasan Keamanan Pangan	UPT PSMKP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UPT PSMKP
					Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	UPT PSMKP
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	UPT PSMKP
					Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UPT PSMKP
					Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	UPT PSMKP
					Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	UPT PSMKP
					Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	UPT PSMKP
				Terbinanya Kelembagaan Keamanan Pangan Kabupaten/Kota		Pembinaan Kelembagaan Keamanan Pangan Kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota Yang Dilaksanakan	Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota	UPT PSMKP
			Meningkatnya Indeks Revormasi Birokrasi		Indeks Revormasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretaris
				Meningkatnya Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subag Program, Keuangan dan Aset
				Meningkatnya Persentase capaian IKU Perangkat Daerah	Persentase capaian IKU Perangkat Daerah		
				Meningkatnya Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (terdiri dari Renstra, RKPD, RKPD-P, Renja, Perjanjian Kinerja, , Dokumen Manajemen Resiko, dan Dokumen Proses Bisnis PD).	Tersusunnya dokumen perencanaan PD	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah laporan Evaluasi Kinerja PD (terdiri dari: Laporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, LKIP dan, LPPD)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah		
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah		
				Meningkatnya Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen kompilasi data administrasi kepegawaian (anjab, abk, skj, profil pegawai terdiri dari kualifikasi, kompetensi dan kinerja individu)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Meningkatnya Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah		
				Meningkatnya Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI		
				Meningkatnya Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Persentase pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor yang ditindaklanjuti		
				Meningkatnya Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dimanfaatkan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan P3DN sesuai TKDN yang disusun		
				Meningkatnya Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Subbag Kepegawaian dan Umum
				Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah dokumen kebijakan pelayanan yang disusun	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM		
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Subbag Program, Keuangan dan Aset
					Jumlah Peralatan kantor dan Mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.3 Uraian SubKegiatan Beserta Kinerja, indikator, Target, dan Pagu Indikatif Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

Berikut adalah tabel berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Tabel 17. Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	16,34	45	50	60	65	68	72	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Pemenuhan Infrastruktur untuk mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	15,34	14,49	13,6	12,75	11,85	10,96	9	
3	Skor Pola Panga Harapan Ketersediaan	Skor	85,29	88,30	89,40	90,00	90,10	90,15	90,50	
4	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Skor	85,29	88,30	89,40	90,00	90,10	90,15	90,50	
5	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	668,70	100	100	100	100	100	100	
6	Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1	%	1,29	5	5	5	5	5	5	

	dari target yang ditetapkan									
2.09.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan										
III	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	16,34	45	50	60	65	68	72	
IV	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	86,65	87	88	89	90	91	92	

Indikator-indikator kinerja yang tercantum dalam Tabel 19 memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana Dinas Pangan dapat mengukur pencapaian tujuan dalam RENSTRA 2025-2029. Setiap indikator yang terukur membantu memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan, ketersediaan pangan berkualitas, dan stabilitas harga pangan. Pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan juga sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan jangka panjang Dinas Pangan dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri dalam hal pangan.

Tabel IKD dalam RENSTRA ini bertujuan menjadi acuan utama dalam pengukuran capaian kinerja dan efektivitas program pemerintah daerah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan di Sulawesi Tengah. Data baseline dan target tahunan diharapkan dapat memberikan arahan konkret bagi pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kebijakan di bidang pangan.

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Output/ Outcome	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
					2025	2026		2027		2028		2029		2030				
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
	(01)	(02)		(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						25.969.830.119,02		27.791.790.901,59		29.825.261.749,56		32.100.679.729,06		34.653.394.335,32			
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	16,34	45	50	11.128.830.119,02	60	11.564.610.901,59	65	11.993.335.349,56	68	12.745.241.437,06	72	14.258.240.683,32			
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah		83,15	84	84,5		85		85,5		86		86,5				
		Persentase capaian IKU Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian IKU Perangkat Daerah		83	85		87		90		92		95				
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	61	61	61	710.000.000	61	734.100.000	61	759.203.000	61	785.367.090	61	812.654.904			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	1	1	1		1		1		1		1				
2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	200.000.000	3	206.000.000	3	212.180.000	3	218.545.400	3	225.101.762		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	12.000.000	1	13.200.000	1	14.520.000	1	15.972.000	1	17.569.200		SULAWESI TENGAH	

2.09.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	2	8.000.000	2	8.800.000	2	9.680.000	2	10.648.000	2	11.712.800	SULAWESI TENGAH
2.09.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	9.000.000	1	9.900.000	1	10.890.000	1	11.979.000	1	13.176.900	SULAWESI TENGAH
2.09.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	2	11.000.000	2	12.100.000	2	13.310.000	2	14.641.000	2	16.105.100	SULAWESI TENGAH
2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	150.000.000	1	154.500.000	1	159.135.000	1	163.909.050	1	168.826.322	SULAWESI TENGAH , KAB. BANGGAI
2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	200.000.000	1	206.000.000	1	212.180.000	1	218.545.400	1	225.101.762	SULAWESI TENGAH

2.09.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1	1	1	60.000.000	1	61.800.000	1	63.654.000	1	65.563.620	1	67.530.529		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	1	60.000.000	1	61.800.000	1	63.654.000	1	65.563.620	1	67.530.529		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.02 -	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Tindakanjuz Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	Meningkatnya Persentase Hasil Tindakanjuz Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP				8.283.830.119,02		8.665.460.901,59		9.037.990.849,56		9.731.554.602,06		11.183.953.039,32			
		Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	97	97	97		97		97		97		97				
2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	55	104	104	7.778.830.119,02	104	8.151.960.901,59	104	8.515.350.849,56	104	9.199.076.902,06	1104	10.640.876.658,32		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00	1	36.602.500,00		SULAWESI TENGAH	

2.09.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	100.000.000,00	1	103.000.000,00	1	106.090.000,00	1	109.272.700,00	1	112.550.881,00		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.300.000,00	1	39.930.000,00	1	43.923.000,00		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	Meningkatnya Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan				140.000.000		145.600.000		151.508.000		157.747.240		164.343.057			
2.09.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	80.000.000	1	82.400.000	1	84.872.000	1	87.418.160	1	90.040.705		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	40.000.000	1	41.200.000	1	42.436.000	1	43.709.080	1	45.020.352		SULAWESI TENGAH	

2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah															
		Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Meningkatnya Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah				160.000.000		163.000.000		166.090.000		169.272.700		172.550.882			
		Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	Meningkatnya Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	1	1	1		1		1		1		1				
2.09.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	1	50.000.000	1	51.500.000	1	53.045.000	1	54.636.350	1	56.275.441		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	3	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.05.0005 -	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1	50.000.000	1	51.500.000	1	53.045.000	1	54.636.350	1	56.275.441		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah				455.000.000		468.650.000		482.709.500		497.190.785		512.106.510			
		Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah															

		Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	Meningkatnya Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI															
		Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor															
2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	65.000.000	1	66.950.000	1	68.958.500	1	71.027.255	1	73.158.073		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	1	40.000.000	1	41.200.000	1	42.436.000	1	43.709.080	1	45.020.352		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	1	50.000.000	1	51.500.000	1	53.045.000	1	54.636.350	1	56.275.441		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	1	50.000.000	1	51.500.000	1	53.045.000	1	54.636.350	1	56.275.441		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	50.000.000	1	51.500.000	1	53.045.000	1	54.636.350	1	56.275.441		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	200.000.000	1	206.000.000	1	212.180.000	1	218.545.400	1	225.101.762		SULAWESI TENGAH	

2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	Meningkatnya Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	90	90	90	170.000.000	90	175.100.000	90	180.353.000	90	185.763.590	90	191.336.498			
2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Tersedianya Mebel	1	1	1	60.000.000	1	61.800.000	1	63.654.000	1	65.563.620	1	67.530.529		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)		8	6	1	40.000.000	11	41.200.000	12	42.436.000	13	43.709.080	14	45.020.352		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	1	70.000.000	1	72.100.000	1	74.263.000	1	76.490.890	1	78.785.617		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi				490.000.000		490.000.000		490.000.000		490.000.000		490.000.000			
		Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah															
2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	1	240.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		SULAWESI TENGAH	

2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	100	100	720.000.000	100	722.700.000	100	725.481.000	100	728.345.430	100	731.295.793			
2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40	40	40	270.000.000	40	270.000.000	40	270.000.000	40	270.000.000	40	270.000.000		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80	80	80	360.000.000	80	360.000.000	80	360.000.000	80	360.000.000	80	360.000.000		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	1	90.000.000	1	92.700.000	1	95.481.000	1	98.345.430	1	101.295.793		SULAWESI TENGAH	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	16,34	45	50	816.000.000	60	840.480.000	65	865.694.400	68	891.665.232	72	918.415.189	2.09.0.00.0.0 0.01.0001 - UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan		
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah															
		Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Meningkatnya Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah				115.000.000		118.450.000		122.003.500		125.663.605		129.433.513			
		Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	Meningkatnya Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK															

2.09.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	1	50.000.000	1	51.500.000	1	53.045.000	1	54.636.350	1	56.275.441		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	3	1	25.000.000	1	25.750.000	1	26.522.500	1	27.318.175	1	28.137.720		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1	40.000.000	1	41.200.000	1	42.436.000	1	43.709.080	1	45.020.352		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah				271.000.000		279.130.000		287.503.900		296.129.017		305.012.887			
		Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Kematangan Penerapan SPBE pada Perangkat Daerah															
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	1	15.000.000	1	15.450.000	1	15.913.500	1	16.390.905	1	16.882.632		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	1	20.000.000	1	20.600.000	1	21.218.000	1	21.854.540	1	22.510.176		SULAWESI TENGAH, KAB. BANGGAI	
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	1	16.000.000	1	16.480.000	1	16.974.400	1	17.483.632	1	18.008.141		SULAWESI TENGAH	

2.09.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	40.000.000	1	41.200.000	1	42.436.000	1	43.709.080	1	45.020.352		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	50.000.000	1	51.500.000	1	53.045.000	1	54.636.350	1	56.275.441		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1	130.000.000	1	133.900.000	1	137.917.000	1	142.054.510	1	146.316.145		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	Meningkatnya Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE				30.000.000		30.900.000		31.827.000		32.781.810		33.765.264			
2.09.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	1	30.000.000	1	30.900.000	1	31.827.000	1	32.781.810	1	33.765.264		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	Meningkatnya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi				250.000.000		257.500.000		265.225.000		273.181.750		281.377.203			
		Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah															

2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	1	100.000.000	1	103.000.000	1	106.090.000	1	109.272.700	1	112.550.881		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	1	150.000.000	1	154.500.000	1	159.135.000	1	163.909.050	1	168.826.322		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	100	100	150.000.000	100	154.500.000	100	159.135.000	100	163.909.050	100	168.826.322			
2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	10	10	60.000.000	10	61.800.000	10	63.654.000	10	65.563.620	10	67.530.529		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20	20	20	60.000.000	20	61.800.000	20	63.654.000	20	65.563.620	20	67.530.529		SULAWESI TENGAH	
2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	1	30.000.000	1	30.900.000	1	31.827.000	1	32.781.810	1	33.765.264		SULAWESI TENGAH	

2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pemenuhan Infrastruktur untuk mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (%)	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	100	100	100	1.400.000.000	100	1.806.000.000	100	2.212.180.000	100	2.618.545.400	100	3.025.101.762			
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Infrastruktur yang Diadakan	Meningkatkan pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	33	3	4	1.400.000.000	8	1.806.000.000	10	2.212.180.000	12	2.618.545.400	14	3.025.101.762			
2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia (Unit)	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	30	3	3	600.000.000	4	800.000.000	5	1.000.000.000	6	1.200.000.000	7	1.400.000.000		SULAWESI TENGAH	
2.09.02.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1	1	1	200.000.000	1	206.000.000	1	212.180.000	1	218.545.400	1	225.101.762		SULAWESI TENGAH	
2.09.02.1.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia (Unit)	Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	3	0	1	600.000.000	4	800.000.000	5	1.000.000.000	6	1.200.000.000	7	1.400.000.000		SULAWESI TENGAH	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Panga Harapan Ketersediaan (Skor)	Meningkatnya Skor Pola Pangan Haran Ketersediaan	85,29	88,30	89,40		90,00		90,10		90,15		90,50				
		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (Skor)	Meningkatnya Skor Pola Pangan Haran Konsumsi	85,29	88,30	89,40	9.225.000.000	90,00	9.949.700.000	90,10	10.219.622.000	90,15	10.504.864.760	90,50	10.792.762.912	2.09.0.00.0.0 0.01.0000 - Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah		
		Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah	668,70	100	100		100		100		100		100				

		Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan (%)	Stabilnya Harga Pangan	1,29	5	5		5		5		5		5						
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Nilai Penurunan Konsumsi Beras	Nilai Penurunan Konsumsi Beras	104,36	101,36	98,36	4.330.000.000	95,36	4.873.200.000	92,36	5.034.837.000	89,36	5.194.363.050	86,36	5.340.490.185					
		Angka Kecukupan Protein ketersediaan (gram/Kap/hr)	Meningkatnya Ketersediaan Protein	73,06	74	75		76		77		78		79						
		Angka Kecukupan Energi Ketersediaan (kkl/Kap/hr)	Meningkatnya Ketersediaan Energi	2400	2400	2400		2400		2400		2400		2400						
		Jumlah Operasi Pasar (Kali)	Meeningkatnya Operasi Pasar	7	7	8		8		9		9		10						
2.09.03.1.01. 0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1	1	1	950.000.000	1	978.500.000	1	1.007.855.000	1	1.038.090.650	1	1.069.233.370		SULAWESI TENGAH			
2.09.03.1.01. 0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	Terlaksananya Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1	1	1	600.000.000	1	750.000.000	1	775.000.000	1	790.000.000	1	830.000.000				SULAWESI TENGAH	
2.09.03.1.01. 0002	Penyediaan Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	Tersedianya Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	1	1	1	600.000.000	1	808.700.000	1	835.000.000	1	900.000.000	1	920.000.000				SULAWESI TENGAH	

2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Laporan)	Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	1	1	1	200.000.000	1	206.000.000	1	212.180.000	1	218.545.400	1	225.101.762	SULAWESI TENGAH	
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	1	1	150.000.000	1	154.500.000	1	159.135.000	1	163.909.050	1	168.826.322	SULAWESI TENGAH	
2.09.03.1.01.0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi (Dokumen)	Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Provinsi	1	1	1	200.000.000	1	206.000.000	1	212.180.000	1	218.545.400	1	225.101.762	KAB. BANGGAI	
2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1	1	1	200.000.000	1	206.000.000	1	212.180.000	1	218.545.400	1	225.101.762	SULAWESI TENGAH	
2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi (Laporan)	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	1	1	1	980.000.000	1	1.100.000.000	1	1.143.902.000	1	1.155.000.000	1	1.170.646.242	SULAWESI TENGAH	
2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	1	1	1	200.000.000	1	206.000.000	1	212.180.000	1	218.545.400	1	225.101.762	SULAWESI TENGAH	
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	Tersedianya informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1	1	1	250.000.000	1	257.500.000	1	265.225.000	1	273.181.750	1	281.377.203	SULAWESI TENGAH	
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (Ton)		668,7	17	175	3.145.000.000	175	3.160.000.000	175	3.176.290.000	175	3.193.992.700	175	3.213.242.881		

		Ketersediaan Data Pangan Lokal (Dokumen)		1	1	1		1	1		1	1					
2.09.03.1.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1	1	1	60.000.000	1	66.000.000	1	72.600.000	1	79.860.000	1	87.846.000		SULAWESI TENGAH
2.09.03.1.02.0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara (Ton)	Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	668,7	17	175	100.000.000	175	103.000.000	175	106.090.000	175	109.272.700	175	112.550.881		SULAWESI TENGAH
2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	668,7	17		300.000.000	175	300.000.000	175	300.000.000	175	300.000.000	175	300.000.000		SULAWESI TENGAH
2.09.03.1.02.0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	Terlaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	668,7	17	175	2.625.000.000	175	2.625.000.000	175	2.625.000.000	175	2.625.000.000	175	2.625.000.000		SULAWESI TENGAH
2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan)	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1	1	1	60.000.000	1	66.000.000	1	72.600.000	1	79.860.000	1	87.846.000		SULAWESI TENGAH
2.09.03.1.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Dokumen Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Tersedianya Dokumen Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal			1	200.000.000	1	206.000.000	1	212.180.000	1	218.545.400	1	225.101.762		
2.09.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal			1	200.000.000	1	206.000.000	1	212.180.000	1	218.545.400	1	225.101.762		SULAWESI TENGAH

2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Angka Kecukupan Protein Konsumsi	Meningkatnya Angka Kecukupan Protein Konsumsi	60,58	61,58	62,58	1.550.000.000	63,58	1.710.500.000	64,58	1.796.315.000	65,58	1.897.963.610	66,58	2.013.928.084			
		Angka Kecukupan Energi Konsumsi	Meningkatnya Angka Kecukupan Energi Konsumsi	2032,8	2100	2150		2200		2250		2300		2350				
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	Terlaksananya Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	1	1	600.000.000	1	650.000.000	1	665.000.000	1	695.000.000	1	720.000.000		SULAWESI TENGAH	
2.09.03.1.04.0002 -	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1	1	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	380.509.160	1	420.000.000		SULAWESI TENGAH	
2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	1	1	350.000.000	1	400.000.000	1	410.000.000	1	440.000.000	1	480.000.000		SULAWESI TENGAH	
2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1	1	1	350.000.000	1	360.500.000	1	371.315.000	1	382.454.450	1	393.928.084		SULAWESI TENGAH	

2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	15,34	14,49	13,36	2.000.000.000	12,75	2.189.000.000	11,85	2.249.170.000	10,96	2.310.545.100	9	2.383.161.454			
2.09.04.1.01 -	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Rasio Kabupaten/Kota Menyusun Peta FSVA	Tersusunnya Peta FSVA	100	100	100	250.000.000	100	257.500.000	100	265.225.000	100	273.181.750	100	281.377.203			
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1	1	1	250.000.000	1	257.500.000	1	265.225.000	1	273.181.750	1	281.377.203		SULAWESI TENGAH	
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah KK Daerah Rawan Pangan dan SKPG yang Diintervensi	Meningkatnya KK Daerah Rawan Pangan dan SKPG yang Diintervensi	790	1300	1600	1.750.000.000	1700	1.931.500.000	1750	1.983.945.000	1900	2.037.363.350	1950	2.101.784.251			
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	1	1	700.000.000	1	850.000.000	1	870.000.000	1	890.000.000	1	920.000.000		SULAWESI TENGAH	
2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1	1	1	500.000.000	1	515.000.000	1	530.450.000	1	546.363.500	1	562.754.405		SULAWESI TENGAH	
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1	1	1	150.000.000	1	154.500.000	1	159.135.000	1	163.909.050	1	168.826.322		SULAWESI TENGAH , KAB. BANGGAI	

2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1	1	1	200.000.000	1	206.000.000	1	212.180.000	1	218.545.400	1	225.101.762		SULAWESI TENGAH		
2.09.04.1.02.0006	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala provinsi yang ditetapkan (Dokumen)	Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala provinsi	1	1	1	200.000.000	1	206.000.000	1	212.180.000	1	218.545.400	1	225.101.762			SULAWESI TENGAH	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	86,65	87	88	1.400.000.000	89	1.442.000.000	90	2.285.260.000	91	3.029.817.800	92	3.275.712.335	2.09.000.0.0 0.01.0001 - UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan			
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase primarket Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	40	40	40	1.400.000.000	40	1.442.000.000	40	2.285.260.000	40	3.029.817.800	40	3.275.712.335				
		Persentase postmarket Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)		46,65	1	48		49		50		51		52					
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	51	51	51	300.000.000	51	309.000.000	51	318.270.000	51	327.818.100	51	337.652.643		SULAWESI TENGAH		
2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1	1	1	300.000.000	1	309.000.000	1	318.270.000	1	327.818.100	1	337.652.643		SULAWESI TENGAH		

2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen)	Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	300.000.000	1	309.000.000	1	318.270.000	1	327.818.100	1	337.652.643	SULAWESI TENGAH
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	1	1	250.000.000	1	257.500.000	1	265.225.000	1	273.181.750	1	281.377.203	SULAWESI TENGAH
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0	0	0	-	0	-	1	800.000.000	1	1.500.000.000	1	1.700.000.000	SULAWESI TENGAH
2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	1	1	250.000.000	1	257.500.000	1	265.225.000	1	273.181.750	1	281.377.203	SULAWESI TENGAH

Berikut adalah tabel mengenai program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan Provinsi

Sulawesi Tengah tahun :

Tabel 18. Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pe

Semua program dan kegiatan saling terintegrasi dengan target RPJMD, RENSTRA, dan kebijakan ketahanan pangan nasional. Hal ini memastikan setiap capaian dan indikator daerah dapat mendukung keberlanjutan program lintas sektor dan menjawab tantangan pangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah hingga 2030. Tabel 20 ini memberikan gambaran jelas tentang berbagai program yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan kemandirian pangan di daerah. Semua program tersebut terintegrasi dengan kegiatan pengelolaan dan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan yang mendukung pengelolaan sektor pangan, serta memastikan infrastruktur yang dibutuhkan tersedia dengan baik. Pendanaan yang dialokasikan untuk setiap kegiatan menunjukkan komitmen terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator utama yang menunjukkan tingkat kesiapan daerah dalam menyediakan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi masyarakat. Target kenaikan indeks tiap tahun dari 78,87 pada 2026, secara bertahap meningkat hingga 82,87 di tahun 2030. Baseline indeks tahun 2024 tercatat di angka 76,87. Kenaikan Indeks Ketahanan Pangan mencerminkan efektivitas program dan intervensi pemerintah dalam meningkatkan produksi, distribusi, serta kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) pada tabel ini juga menunjukkan nilai yang sama dan target kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menegaskan konsistensi upaya pemerintah daerah untuk menjaga suplai pangan dan memperbaiki ketahanan dari sisi produksi maupun akses konsumsi pangan bagi seluruh penduduk Sulawesi Tengah. Tujuan utamanya agar daerah tidak rentan terhadap gangguan pasokan maupun bencana yang berdampak pada distribusi pangan.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Indikator lain yang sangat penting adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU). Persentase ini menargetkan penurunan yang cukup signifikan dari baseline 9,66 pada tahun 2024 menjadi hanya 6,90 di tahun 2030. Penurunan prevalensi PoU secara bertahap setiap tahunnya (misal 8,62 di tahun 2026, 7,33 di tahun 2029) mencerminkan keberhasilan program penguatan akses pangan, edukasi konsumsi bergizi, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok

Berikut Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Provinsi Sulawesi tengah tahun 2025-2029:

Tabel 19. Indikator Kinerja Utama RENSTRA Dinas Pangan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah									
2.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	76,87	77,87	78,87	79,87	80,87	81,87	82,87	
3.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	9,66	9,05	8,62	8,19	7,76	7,33	6,90	

Indikator-indikator kinerja utama yang tercantum dalam Tabel 21 memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dapat memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan ketahanan pangan. Setiap indikator, mulai dari indeks ketahanan pangan, indeks ketahanan pangan lebih terfokus (IKP), hingga prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan, memiliki peran penting dalam menilai efektivitas program-program yang dilaksanakan. Pencapaian target yang telah ditetapkan akan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan mengurangi angka ketidacukupan pangan di daerah tersebut. Tabel 21 Indikator Kinerja Utama juga digunakan sebagai acuan utama dalam perumusan kebijakan, penentuan target, serta evaluasi capaian program ketahanan pangan tahun 2026–2030. Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan dan menurunnya prevalensi konsumsi pangan yang tidak cukup menjadi tujuan strategis yang akan dijadikan parameter keberhasilan perangkat daerah di bidang pangan.

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 20. Indikator Kinerja Kunci RENSTRA Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan		%	15,34	14,49	13,6	12,75	11,85	10,96	9	
3.	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	positif	%	86,65	87	88	89	90	91	92	
4.	Persentase Pemenuhan Infrastruktur untuk mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Skor Pola Panga Harapan Ketersediaan		Skor	85,29	88,30	89,40	90,00	90,10	90,15	90,50	
6.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi		Skor	85,29	88,30	89,40	90,00	90,10	90,15	90,50	
7.	Persentase Jumlah Cadangan Pangan		Persentase	668,70	100	100	100	100	100	100	
8.	Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan		%	1,29	5	5	5	5	5	5	

Indikator-indikator yang tercantum dalam Tabel 22 sangat relevan dengan tujuan Dinas Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah. Setiap indikator berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, kualitas pangan, serta stabilitas harga pangan. Program-program yang mendukung penguatan infrastruktur pangan, peningkatan kualitas pengawasan pangan, serta cadangan pangan yang memadai harus menjadi prioritas dalam RENSTRA. Dengan pencapaian target-target indikator ini, Dinas Pangan dapat memastikan tercapainya ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah.

Indikator kinerja kunci pada Tabel 22 ini menjadi fondasi utama dalam penyusunan renstra Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah. Masing-masing capaian indikator tersebut harus menjadi referensi dalam pengembangan program, penganggaran, serta evaluasi secara berkala guna mewujudkan tujuan strategis ketahanan dan kemandirian pangan provinsi secara berkelanjutan hingga 2029. Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci dalam rancangan renstra Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah berfungsi sebagai alat ukur pencapaian utama bidang pangan di tingkat provinsi. Setiap indikator dalam tabel ini menetapkan target dan baseline yang akan menjadi referensi dalam pengembangan strategi, kebijakan, serta intervensi sektor pangan selama periode 2025–2029.

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan utama untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya pangan yang efektif dan efisien. Melalui dokumen ini, Dinas Pangan berkomitmen untuk mendukung pencapaian kedaulatan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan meningkatkan ketersediaan pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.

Selama lima tahun ke depan, RENSTRA ini akan menjadi pedoman bagi Dinas Pangan dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program strategis yang sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah, serta mengoptimalkan potensi lokal yang ada. Fokus utama dari strategi ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor dan memperkuat kapasitas pangan lokal, mengingat pentingnya ketahanan pangan untuk mencegah krisis pangan yang dapat merugikan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RENSTRA ini juga menjadi tanggapan atas berbagai tantangan global, nasional, dan lokal, seperti fluktuasi harga pangan, kerawanan pangan di daerah-daerah tertentu, serta potensi ancaman terhadap ketahanan pangan akibat perubahan iklim dan bencana alam. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur pangan, pengelolaan cadangan pangan yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas dan keamanan pangan menjadi fokus utama yang harus terus dijaga dan diperkuat.

Sebagai langkah konkrit, Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah akan terus memperkuat koordinasi antar instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA ini. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta akan sangat penting untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berdaulat.

Namun demikian, keberhasilan implementasi RENSTRA ini sangat bergantung pada komitmen, sumber daya manusia yang berkualitas, serta alokasi anggaran yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program-program yang ada, agar segala tantangan yang muncul dapat segera ditangani dengan tepat.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan RENSTRA ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang jelas dan efektif dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan dukungan dan kerja sama yang baik, kita yakin dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi di bidang pangan.

